



Katalog BPS: 2102030



KETENAGAKERJAAN PENDUDUK INDONESIA

Hasil Sensus Penduduk 2010



BADAN PUSAT STATISTIK

KETENAGAKERJAAN PENDUDUK INDONESIA

Hasil Sensus Penduduk 2010

<http://www.bps.go.id>

KETENAGAKERJAAN PENDUDUK INDONESIA

HASIL SENSUS PENDUDUK 2010

ISBN: 978-979- 064-306-2

No. Publikasi: 04000.1101

Katalog BPS: 2102030

Ukuran Buku: B5 (17,6 cm x 25 cm)

Jumlah Halaman: x + 53 halaman

Naskah:

Subdirektorat Statistik Demografi

Penulis:

Dani Jaelani

Rachmi Agustiyani

Penyunting:

S. Aden Gultom

Gambar Kulit:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Dicetak oleh:

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Data hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010) mengandung banyak informasi yang relevan dan perlu bagi bangsa maupun dunia internasional. Bahkan dunia ilmu pengetahuan akan berkembang pesat karena data dan informasi statistik ini akan menjadi temuan-temuan baru.

Gambaran ringkas dari hasil SP2010 mengenai berbagai hal disajikan dalam beberapa buku secara seri. Buku “**Ketenagakerjaan Penduduk Indonesia**” ini adalah salah satu seri yang menggambarkan situasi dan perkembangan indikator kependudukan menyangkut ketenagakerjaan.

Data dan informasi yang bisa dimuat dalam buku ini hanya bersifat ringkas, menyangkut isu-isu pokok saja. Meskipun demikian, data dan informasi tersebut akan cukup menggugah pembaca untuk mengkaji lebih jauh, lebih dalam, dan lebih kompleks terkait data dan informasi ketenagakerjaan.

Data dan informasi lain yang dapat diakses oleh publik tersedia pada website BPS dengan alamat: <http://sp2010.bps.go.id>. Dengan penyajian *online* itu, akan lebih banyak data dan penjelasan yang dapat diperoleh serta lebih mudah mengaksesnya dari mana saja dan kapan saja.

Data hasil SP2010 merupakan aset bangsa Indonesia yang sangat terbuka untuk dieksplorasi oleh para pakar dari berbagai latar belakang disiplin ilmu. Dari data dan informasi tersebut bisa diperhitungkan berbagai aspek sosial ekonomi, seperti segmentasi pasar, sumberdaya manusia, kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan), serta potensi ketahanan nasional atau wilayah.

Terakhir, kami selaku penghasil data dan informasi statistik mengajak semua pihak memanfaatkan secara optimal data dan informasi statistik hasil SP2010 sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat dan bangsa Indonesia di dalam negeri maupun di dunia internasional.

Semoga Allah, Tuhan yang Maha Kasih, menyertai statistik Indonesia sekarang dan selama-lamanya.

Jakarta, Oktober 2011
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia

Dr. Rusman Heriawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
1. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.3. SISTEMATIKA PENULISAN	2
2. METODOLOGI	3
2.1. DEFINISI OPERASIONAL	3
2.2. SUMBER DATA	5
2.3. KETERBATASAN DATA.....	7
3. KETENAGAKERJAAN HASIL SP2010.....	9
3.1. ANGKATAN KERJA	9
3.1.1. Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal.....	9
3.1.2. Angkatan Kerja Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal.....	11
3.1.3. Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal	13
3.2. PENGANGGURAN	14
3.2.1. Pengangguran Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal.....	15
3.2.2. Pengangguran Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal.....	16
3.2.3. Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Jenis Kelamin, dan Daerah tempat Tinggal	17
3.3. PENDUDUK BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN	18
3.3.1. Penduduk Bekerja Menurut lapangan Pekerjaan, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal.....	18
3.3.2. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Provinsi.....	20
3.3.3. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan	20

3.4. PENDUDUK BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN	21
3.4.1. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal.....	22
3.4.2. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin	23
3.4.3. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Provinsi	24
4. PERBANDINGAN KETENAGAKERJAAN ANTARA SP1990, SP2000, DAN SP2010	27
4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	27
4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	28
4.3. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan	30
4.4. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan.....	32
5. PENUTUP	35
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kegiatan Seminggu yang Lalu, Hasil SP2010	13
Tabel 2	TPAK Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Indonesia, Hasil SP2010	14
Tabel 3	TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Indonesia, Hasil SP2010	17
Tabel 4	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Indonesia, Hasil SP2010 (Dalam Ribuan Jiwa).....	19

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Diagram Ketenagakerjaan SP2010	7
Gambar 2	TPAK Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Indonesia, Hasil SP2010.....	10
Gambar 3	TPAK Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin di Indonesia, Hasil SP2010	12
Gambar 4	TPT Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Indonesia, Hasil SP2010.....	15
Gambar 5	TPT Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin di Indonesia, Hasil SP2010	16
Gambar 6	Distribusi Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan di Indonesia, Hasil SP2010	21
Gambar 7	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Indonesia, Hasil SP2010.....	22
Gambar 8	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal di Indonesia, Hasil SP2010	23
Gambar 9	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Indonesia, Hasil SP2010.....	24
Gambar 10	Proporsi Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan di Indonesia, Hasil SP2010	25
Gambar 11	Perkembangan TPAK Indonesia Menurut Daerah Tempat Tinggal, 1990-2010.....	27
Gambar 12	Perkembangan TPAK Indonesia Menurut Jenis Kelamin, 1990-2010.....	28
Gambar 13	Perkembangan TPT Indonesia Menurut Daerah Tempat Tinggal, 1990-2010.....	29
Gambar 14	Perkembangan TPT Indonesia Menurut Jenis Kelamin, 1990-2010.....	30
Gambar 15	Perkembangan Proporsi Pekerja Sektor Pertanian di Indonesia, 1990-2010.....	31
Gambar 16	Perkembangan Proporsi Pekerja Sektor Pertanian Menurut Daerah Tempat Tinggal di Indonesia, 1990-2010.....	32
Gambar 17	Perkembangan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Indonesia, 1990-2010.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Catatan Teknis	41
Tabel L.1 TPAK Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Indonesia, Hasil SP2010	44
Tabel L.2 TPAK Menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Indonesia, Hasil SP2010	45
Tabel L.3 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu dan Tingkat Pendidikan di Indonesia, Hasil SP2010 (Dalam Ribuan Jiwa).....	46
Tabel L.4 TPT Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Indonesia, Hasil SP2010	46
Tabel L.5 TPT Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Indonesia, Hasil SP2010	47
Tabel L.6 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Provinsi di Indonesia, Hasil SP2010	48
Tabel L.7 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan di Indonesia, Hasil SP2010	52
Tabel L.8 Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Indonesia, Hasil SP2010	53
Tabel L.9 Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal di Indonesia, Hasil SP2010	53

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan penyajian data demografi, ekonomi dan sosial yang menyangkut semua penduduk/orang pada waktu tertentu di suatu negara atau suatu wilayah. Sensus penduduk di Indonesia biasa disebut pencacahan penduduk, yaitu pengumpulan data/informasi yang dilakukan terhadap seluruh penduduk yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia. Data yang dikumpulkan antara lain: nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, kewarganegaraan, pekerjaan, dan tempat lahir. Hasilnya adalah data jumlah penduduk beserta karakteristiknya, yang sangat berguna sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. SP2010 dapat memberikan gambaran secara aktual mengenai kondisi penduduk, perumahan, pendidikan, dan ketenagakerjaan sampai wilayah administrasi terkecil.

Sesuai dengan UU No.16 tahun 1997 pasal 8 ayat 1 menghendaki agar sensus penduduk di Indonesia dilaksanakan sekali dalam setiap 10 tahun dan sejalan dengan rekomendasi PBB, maka pada tahun 2010 Indonesia menyelenggarakan sensus penduduk. Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010) merupakan sensus penduduk yang keenam sejak Indonesia merdeka. Sebelumnya sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak lima kali, yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, dan 2000.

Kegiatan SP2010 dilaksanakan di seluruh wilayah geografis Indonesia yang meliputi 33 provinsi, 497 kabupaten/kota, 6.651 kecamatan dan 77.126 desa/kelurahan. Disamping itu dilakukan juga pendataan melalui *e-census* (*email* dan *website*) terhadap duta besar perwakilan RI dan keluarganya di Luar Negeri. Kelengkapan cakupan merupakan masalah yang penting dalam sensus penduduk sehingga dapat dipastikan tidak ada rumah tangga ataupun anggota rumah tangga yang terlewat atau tercacah dua kali. Hasil SP2010 ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama data dasar kependudukan.

Publikasi hasil SP2010 mengenai 'Ketenagakerjaan Penduduk Indonesia' dimaksud untuk memberikan gambaran secara ringkas mengenai struktur ketenagakerjaan penduduk (bekerja dan pengangguran) dan kegiatan ekonomi penduduk (penduduk bekerja menurut lapangan dan status pekerjaan). Publikasi ini merupakan salah satu dari 9 publikasi hasil SP2010.

1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SP2010 adalah:

1. Mengumpulkan dan menyajikan data dasar kependudukan sampai wilayah administrasi terkecil.
2. Membentuk Kerangka Sampel Induk (KSI) untuk kepentingan survei-survei lain yang dilakukan dengan pendekatan rumah tangga.

3. Memperkirakan berbagai parameter kependudukan sampai wilayah administrasi tertentu.
4. Mengumpulkan informasi kependudukan yang dapat digunakan/dimanfaatkan untuk penyusunan basis data kependudukan.

Maksud dan tujuan pembuatan Publikasi 'Ketenagakerjaan Penduduk Indonesia' ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran umum situasi ketenagakerjaan di Indonesia secara ringkas, berdasarkan hasil SP2010; dan
2. Untuk memberikan gambaran perkembangan (tren) ketenagakerjaan di Indonesia dari tahun 1990–2010, berdasarkan hasil SP1990, SP2000 dan SP2010.
3. Dengan tersedianya publikasi ini, diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak terkait untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat.

1.3. Sistematika Penulisan

Publikasi ini disusun dalam lima bab, Bab 1: Pendahuluan, Bab 2: Metodologi, Bab 3: Ketenagakerjaan Hasil SP2010, Bab 4: Perbandingan Ketenagakerjaan antara SP1990, SP2000 dan SP2010, Bab 5: Penutup. Selain lima bab tersebut, lampiran disajikan di bagian akhir penulisan. Lampiran terdiri dari catatan teknis dan tabel-tabel pendukung.

2. METODOLOGI

2.1. Definisi Operasional

Beberapa definisi umum yang digunakan dalam SP2010 dan terkait dengan ketenagakerjaan, antara lain:

Penduduk

Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk dalam SP2010, seperti halnya dalam sensus-sensus penduduk sebelumnya menggunakan konsep “*de jure*” atau lebih tepatnya konsep “dimana seseorang biasanya menetap/bertempat tinggal” (*usual residence*) untuk penduduk yang bertempat tinggal tetap. Menurut konsep ini penduduk suatu wilayah adalah mereka yang biasanya tinggal di wilayah itu.

SP2010 mencakup pula penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap. Pencacahan penduduk ini menggunakan konsep “*de facto*” atau tempat dimana seseorang berada pada waktu pencacahan.

Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.

Kepala rumah tangga (KRT) adalah salah seorang dari ART yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT

Anggota rumah tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang sedang berada di rumah pada waktu listing maupun yang sementara tidak berada di rumah.

Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau sama dengan umur pada waktu ulang tahun yang terakhir.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki responden.

Konsep ketenagakerjaan yang digunakan pada SP2010 mengacu pada konsep ketenagakerjaan internasional yaitu sesuai dengan konsep yang dipakai ILO (*International Labor Organization*) dan dituangkan dalam Buku 6 Pedoman Pencacah SP2010.

Berikut beberapa konsep dan definisi ketenagakerjaan yang digunakan pada SP2010:

Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas.

Seminggu yang lalu adalah jangka waktu 7 hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan dengan jangka waktu paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus.

Mencari pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang berusaha mendapatkan pekerjaan. Kegiatan mencari pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih menunggu/mengharapkan jawaban. Jadi dalam kategori ini juga termasuk mereka yang telah memasukkan lamaran dan sedang menunggu hasilnya.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang 'baru' (bukan merupakan pengembangan suatu usaha), yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar.

Bersedia bekerja adalah keinginan untuk bekerja atau menerima pekerjaan tetapi tidak aktif mencari pekerjaan.

Pengangguran (definisi standar) yaitu meliputi penduduk usia kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha¹.

Pengangguran definisi diperluas selain meliputi penduduk usia kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha tetapi juga mencakup penduduk usia kerja yang tidak aktif mencari kerja tetapi bersedia/siap bekerja.

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan atau bidang usaha yang dilakukan perusahaan/usaha/lembaga tempat responden bekerja, atau yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja. Standar klasifikasi untuk mengelompokkan Lapangan Usaha menggunakan modifikasi KBLI 2009 yang merujuk *International Standard Industrial*

¹ Berdasarkan referensi ILO, pengangguran dikelompokkan menjadi pengangguran (standar) dan pengangguran diperluas (relaksasi). Dengan pertimbangan keterbandingan dengan SP sebelumnya maka konsep pengangguran dalam publikasi ini hanya pengangguran definisi standar.

Classification (ISIC) Rev.4. Lapangan usaha diklasifikasikan menjadi 19 kategori yaitu: 01) Pertanian tanaman padi dan palawija; 02) Hortikultura; 03) Perkebunan; 04) Perikanan; 05) Peternakan; 06) Kehutanan dan Pertanian lainnya; 07) Pertambangan dan penggalian; 08) Industri pengolahan; 09) Listrik dan gas; 10) Konstruksi/bangunan; 11) Perdagangan; 12) Hotel dan rumah makan; 13) Transportasi dan pergudangan; 14) Informasi dan komunikasi; 15) Keuangan dan asuransi; 16) Jasa pendidikan; 17) Jasa kesehatan; 18) Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan perorangan dan 19) Lainnya.

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan. Dalam SP2010 status pekerjaan dibedakan menjadi:

- **Berusaha sendiri** adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
- **Berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar** adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/karyawan/pegawai tak dibayar dan atau buruh/karyawan/pegawai tidak tetap.
- **Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar** adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar.
- **Buruh/karyawan/pegawai** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.
- **Pekerja bebas** adalah pekerja yang tidak mempunyai majikan tetap, mencakup pekerja bebas di usaha pertanian dan non pertanian.
- **Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar** adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha tanpa mendapat upah/gaji atau imbalan baik berupa uang maupun barang.

2.2. Sumber Data

Secara umum, data SP2010 diperoleh dari daftar/kuesioner SP2010-C1, SP2010-L2, dan SP2010-C2. Daftar SP2010-C1 digunakan untuk pencacahan lengkap rumah tangga dan penduduk, daftar SP2010-L2 digunakan untuk pencacahan penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap dan daftar SP2010-C2 digunakan untuk pencacahan lengkap rumah tangga di lokasi khusus.

Data ketenagakerjaan diperoleh dari daftar SP2010-C1 dan SP2010-C2. Dari daftar SP2010-C1, data ketenagakerjaan yang diperoleh adalah data tentang kegiatan seminggu yang lalu (bekerja, punya pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja, mencari

pekerjaan atau mempersiapkan usaha dan bersedia bekerja), lapangan usaha dan status pekerjaan. Dari daftar SP2010-C2, data ketenagakerjaan hanya meliputi kegiatan seminggu yang lalu dan lapangan usaha, tidak menanyakan status pekerjaan responden.

Berikut ditampilkan rincian pertanyaan terkait ketenagakerjaan yang berasal dari daftar SP2010-C1.

216. Kegiatan (*NAMA*) seminggu yang lalu:

- a. Apakah bekerja atau berusaha? 1. Ya → ke P217
 2. Tidak
Bekerja atau berusaha ialah melakukan kegiatan untuk memperoleh (membantu memperoleh) upah atau gaji atau laba yang dilakukan paling sedikit 1 jam.
- b. Apakah mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja? 1. Ya → ke P217
 2. Tidak
Seperti menunggu panen, cuti, sakit, dll.
- c. Apakah mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha? 1. Ya → ke P219
 2. Tidak
- d. Apakah bersedia bekerja apabila ada yang menyediakan? 1. Ya
 2. Tidak } ke P219

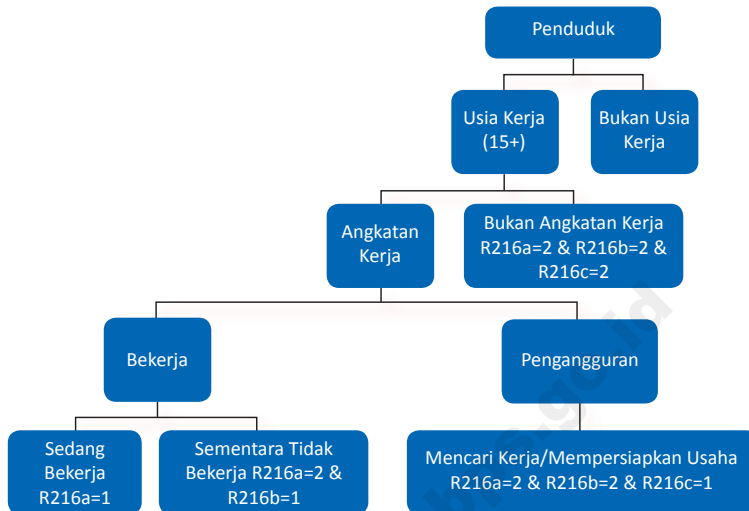
217. Apa lapangan usaha atau bidang pekerjaan (utama) dari tempat bekerja (*NAMA*) selama seminggu yang lalu?
(Tuliskan selengkap-lengkapny, contoh: pertanian tanaman padi, sopir di perusahaan tekstil, sopir di Pemda, guru SMP Negeri, mengojek motor, dokter di Puskesmas, dsb).

218. Apakah status atau kedudukan (*NAMA*) dalam pekerjaan (utama) seminggu yang lalu?

1. Berusaha sendiri
 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar
 3. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar
 4. Buruh atau karyawan atau pegawai
 5. Pekerja bebas
 6. Pekerja keluarga atau tidak dibayar

Berdasarkan rincian pertanyaan (R.216a) sampai dengan (R.216d) dapat disusun diagram ketenagakerjaan yang digunakan sebagai berikut:

Gambar 1
Diagram Ketenagakerjaan SP2010



2.3. Keterbatasan Data

Beberapa keterbatasan data ketenagakerjaan yang dihasilkan SP2010 antara lain:

1. Data ketenagakerjaan hanya ditanyakan kepada penduduk yang bertempat tinggal tetap dengan SP2010-C1 dan SP2010-C2, sementara penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap, seperti tuna wisma, anak buah kapal, dan lain-lain yang dicacah dengan SP2010-L2 tidak ditanyakan.
2. Mengingat keterbatasan ruang yang tersedia, maka dalam SP2010 tidak ditanyakan jenis pekerjaan seperti pada SP1990 dan SP2000.
3. Kegiatan SP2010 bersifat *massive*, dan struktur pertanyaan yang berbeda dengan struktur Sakernas, sehingga data ketenagakerjaan dari kedua sumber tersebut tidak dapat dibandingkan.

3. KETENAGAKERJAAN HASIL SP2010

3.1. Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja menggambarkan jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam perekonomian yaitu mereka yang sedang bekerja, sementara tidak bekerja dan mereka yang menganggur.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase perbandingan jumlah angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Indikator ini dapat menggambarkan jumlah pasokan tenaga kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang maupun jasa.

Tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. Oleh sebab itu, partisipasi penduduk dalam angkatan kerja cenderung berbeda jika dilihat antara beberapa variabel demografi.

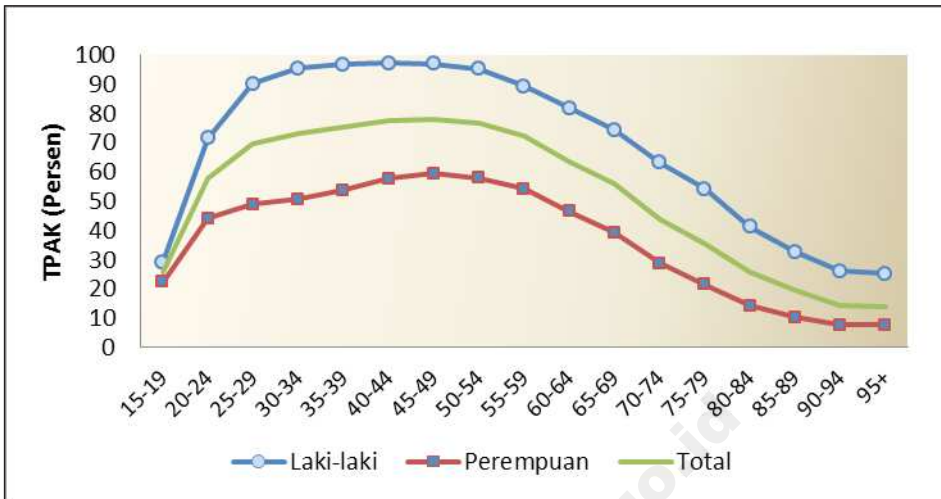
TPAK di tingkat nasional hasil SP2010 adalah sebesar 64,0 persen. Angka tersebut berarti dari 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Indonesia yang ikut berpartisipasi aktif dalam perekonomian hanya sekitar 64 orang. Sedangkan 36 orang lainnya melakukan kegiatan lain seperti: bersekolah; mengurus rumah tangga; pensiun, atau melakukan kegiatan lainnya yang tidak bernilai ekonomis.

Pada subbab berikut akan disampaikan tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja menurut beberapa karakteristik yaitu: umur, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan provinsi.

3.1.1. Angkatan Kerja menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal

Umur akan sangat mempengaruhi penduduk apakah mereka akan masuk ke dalam pasar kerja atau tidak. Pada kelompok usia muda (15–19 tahun), sebagian besar penduduk cenderung memilih sekolah daripada bekerja atau mencari kerja. Begitu pula pada kelompok usia tua (60 tahun ke atas), banyak penduduk yang akan meninggalkan pasar kerja karena telah memasuki masa pensiun atau telah berhenti bekerja.

Gambar 2
TPAK Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Indonesia,
Hasil SP2010



Jika dilihat berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin (Gambar 2), maka tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi lebih rendah daripada laki-laki. TPAC perempuan selalu lebih rendah daripada TPAC laki-laki pada setiap kelompok umur.

TPAC laki-laki paling tinggi pada usia (40-44) tahun, sementara untuk perempuan TPAC tertinggi pada usia (45-49) tahun. Hal ini berarti usia puncak pada laki-laki untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi adalah antara umur (40-44) tahun, sedangkan untuk perempuan antara umur (45-49) tahun.

Pola TPAC laki-laki terus meningkat sampai kelompok umur (30-34) tahun, kemudian cenderung stabil dan kembali menurun mulai pada kelompok umur (55-59) tahun hingga (95+) tahun. Sementara pada perempuan, TPAC meningkat tajam sampai kelompok umur (20-24) tahun, kemudian terus meningkat sedikit demi sedikit, hingga mencapai puncak pada kelompok umur (45-49) tahun dan mulai mengalami penurunan pada kelompok umur (50-54) tahun hingga (95+) tahun.

- Partisipasi perempuan untuk aktif secara ekonomi pada setiap kelompok umur selalu lebih rendah dari pada laki-laki.
- Indikasi perempuan meninggalkan pasar kerja ketika menikah dan mengurus anak dan kembali berpartisipasi ketika anak-anak sudah besar, tidak tampak secara nyata.
- TPAC penduduk lansia lebih tinggi di perdesaan daripada di perkotaan

Pada negara berkembang, biasanya pola siklus ketenagakerjaan perempuan menyerupai kurva M. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak perempuan meninggalkan pasar kerja ketika mereka menikah dan mengurus anak. Mereka akan cenderung kembali ke pasar kerja atau kembali berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi ketika anak-anak

mereka sudah besar. Pada gambar di atas, berdasarkan hasil SP2010 pola tersebut tidak tampak secara nyata.

Profil ketenagakerjaan penduduk di daerah perdesaan dan di daerah perkotaan cenderung berbeda. Tingkat partisipasi penduduk di perdesaan untuk masuk pasar kerja lebih tinggi dibanding di daerah perkotaan. Hasil SP2010 menunjukkan bahwa TPAK di perdesaan 68,6 persen, lebih tinggi daripada TPAK perkotaan yang hanya sebesar 59,5 persen.

Jika dibedakan menurut kelompok umur, TPAK di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan TPAK di daerah perkotaan pada hampir semua kelompok umur. Pada kelompok-kelompok usia tua yaitu: (65–69) tahun sampai (90–94) tahun, partisipasi penduduk untuk aktif secara ekonomi di daerah perdesaan lebih tinggi sekitar 1,5 kali daripada di daerah perkotaan (Lampiran-Tabel L.1) .

3.1.2. Angkatan Kerja Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal

Di Indonesia, tingkat partisipasi penduduk untuk aktif secara ekonomi bervariasi antarprovinsi. Perbedaan pola pikir, tradisi, kebijakan pemerintah daerah dapat mempengaruhi pola TPAK pada tiap-tiap provinsi.

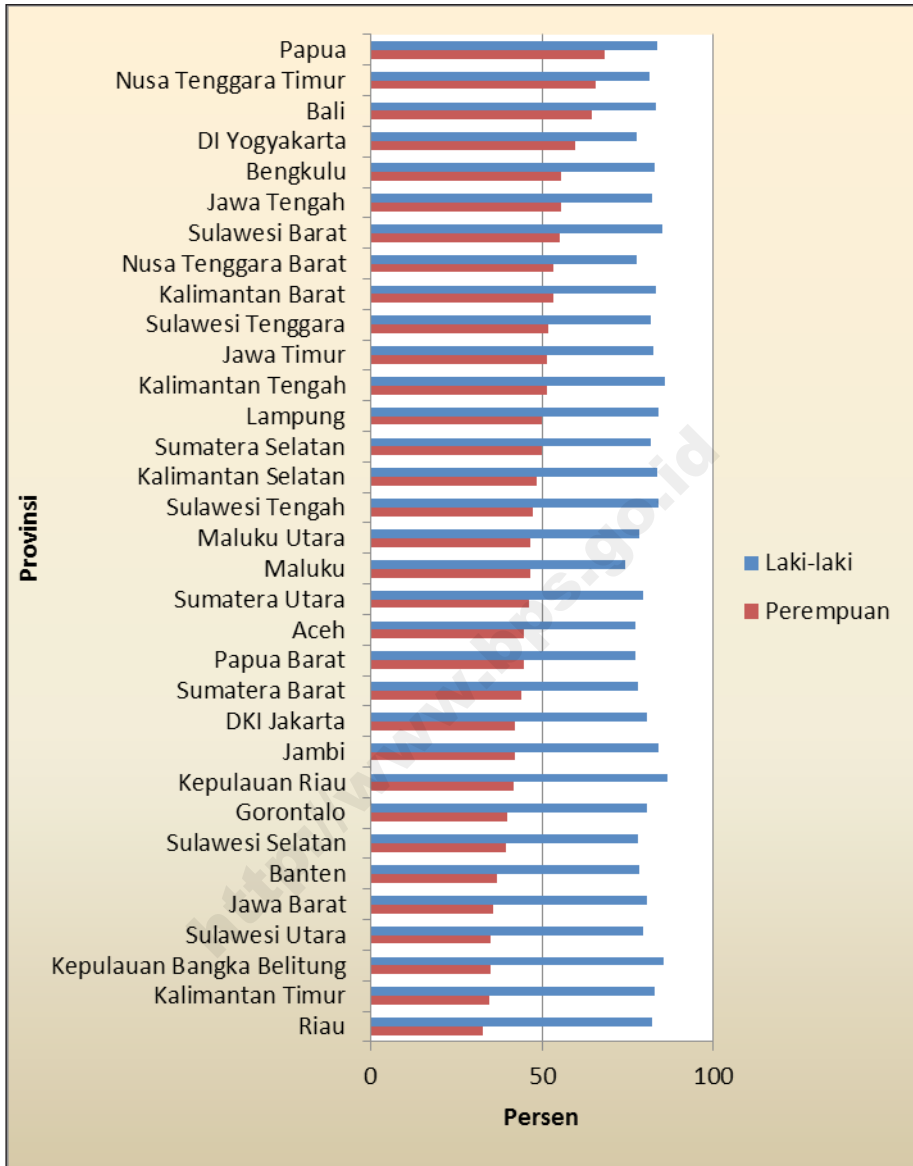
Berdasarkan hasil SP2010, tiga provinsi dengan TPAK tertinggi adalah Papua, Bali, dan Nusa Tenggara Timur yaitu berturut-turut sebesar 76,3 persen, 73,8 persen dan 73,2 persen. Sementara itu empat provinsi dengan TPAK terendah adalah Sulawesi Utara (57,5 persen), Sulawesi Selatan (57,8 persen), Banten, dan Riau, masing-masing sebesar 58,1 persen (Lampiran-Tabel L.2).

Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa tiga provinsi dengan TPAK tertinggi untuk perempuan adalah di Provinsi Papua, NTT, dan Bali. Sementara itu tiga provinsi dengan TPAK terendah untuk perempuan yaitu Riau, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Di hampir semua provinsi, kecenderungan yang terjadi adalah TPAK di perdesaan lebih tinggi dibanding daerah perkotaan. Hal yang berbeda terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dan Banten, dimana TPAK di perdesaan lebih rendah daripada di perkotaan (Lampiran-Tabel L.2).

- *Tiga provinsi dengan TPAK tertinggi yaitu: Papua, Bali dan Nusa Tenggara Timur.*
- *TPAK perempuan paling tinggi di Provinsi Papua, NTT, dan Bali.*
- *TPAK perempuan terendah di Provinsi Riau, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Bangka Belitung.*

Gambar 3
TPAK Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin di Indonesia, Hasil SP2010



3.1.3. Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal

Kualitas tenaga kerja suatu negara dapat diukur salah satunya dengan melihat tingkat pendidikannya. Angkatan kerja di Indonesia hasil SP2010 didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD, yaitu sekitar 35,2 persen dari total angkatan kerja, bahkan angkatan kerja yang berpendidikan SD ke bawah mencapai 50,4 persen. Sementara angkatan kerja yang berpendidikan di atas SMA hanya 8,5 persen dari total angkatan kerja. Hal ini mencerminkan kualitas tenaga kerja di Indonesia masih rendah (Tabel 1).

- *Kualitas Angkatan Kerja Indonesia masih rendah (50,4 % berpendidikan SD ke bawah)*
- *Mereka yang berpendidikan SM Kejuruan, tingkat partisipasi secara ekonomi lebih tinggi daripada mereka yang berpendidikan SLTA/MA/ sederajat.*

Tabel 1
Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kegiatan Seminggu yang Lalu, Hasil SP2010

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Kegiatan Seminggu yang Lalu				Penduduk Usia Kerja
	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja	
	Bekerja	Pengangguran	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak/belum pernah sekolah	7,8	1,7	7,7	8,2	7,9
Tidak/belum tamat SD	7,6	2,8	7,5	6,8	7,2
SD/MI/sederajat	35,6	19,6	35,2	30,7	33,6
SLTP/MTs/sederajat	17,5	23,4	17,6	26,5	20,8
SLTA/MA/sederajat	20,3	38,4	20,8	22,7	21,5
SM Kejuruan	2,7	5,7	2,8	1,8	2,4
Diploma I/II	1,2	1,0	1,2	0,5	0,9
Diploma III	1,7	2,2	1,7	1,0	1,5
Diploma IV/Universitas	5,2	5,2	5,2	1,7	3,9
S2/S3	0,4	0,1	0,4	0,1	0,3
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

TPAK penduduk usia kerja dengan tingkat pendidikan S2/S3 paling tinggi dibandingkan semua jenjang pendidikan yaitu mencapai 91,0 persen. Dengan kata lain hampir semua penduduk usia kerja yang berpendidikan S2/S3 berpartisipasi aktif dalam pasar kerja. Sementara TPAP untuk mereka yang tidak atau belum pernah mengenyam bangku sekolah hanya sekitar 62,5 persen (Tabel 2).

Jika dibandingkan antara mereka yang lulus pendidikan menengah kejuruan dengan pendidikan menengah umum, ternyata tingkat partisipasi untuk aktif secara ekonomi

lebih tinggi pada mereka yang berpendidikan SM Kejuruan. Hal tersebut terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan, baik di perdesaan maupun di perkotaan.

TPAK pada setiap jenjang pendidikan tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok antara daerah perdesaan maupun perkotaan, namun sebaliknya jika dibedakan menurut jenis kelamin. TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dari pada TPAK perempuan utamanya pada jenjang pendidikan menengah ke bawah.

Tabel 2
TPAK Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Indonesia, Hasil SP2010

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	TPAK				Total
	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		
	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak/belum pernah sekolah	80,8	52,1	48,1	67,0	62,5
Tidak/belum tamat SD	84,3	50,7	55,8	71,0	66,0
SD/MI/Sederajat	86,3	48,7	59,0	71,9	67,0
SLTP/MTs/sederajat	71,1	36,2	50,2	58,6	54,1
SLTA/MA/sederajat	79,5	41,0	59,8	67,3	61,9
SM Kejuruan	86,1	51,6	72,7	74,9	73,2
Diploma I/II	88,4	74,6	75,4	87,8	80,3
Diploma III	86,4	66,2	73,4	84,8	75,3
Diploma IV/Universitas	91,5	75,3	82,7	90,6	84,1
S2/S3	93,2	86,0	90,6	94,5	91,0
Nasional	81,2	46,8	59,5	68,6	64,0

3.2. Pengangguran

Adanya sejumlah pengangguran pada dasarnya menggambarkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply*) pada pasar kerja dibanding lowongan yang tersedia. Pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan.

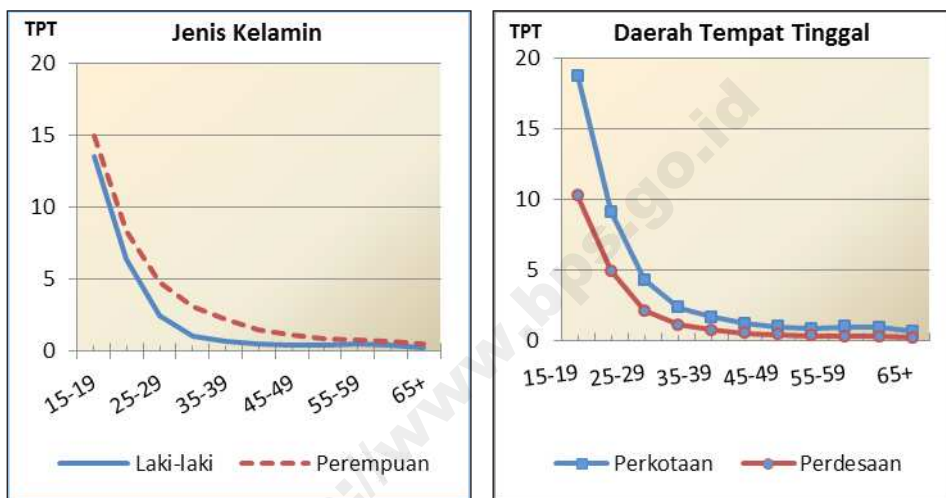
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan yang secara aktif mencari kerja/mempersiapkan usaha. TPT merupakan indikator yang sangat informatif yang dapat menggambarkan indikasi maupun kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan. Tingginya angka TPT mencerminkan adanya kegagalan dalam pasar kerja untuk menyerap sejumlah angkatan kerja.

TPT Indonesia hasil SP2010 adalah sebesar 2,6 persen, yang artinya dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia yang termasuk kategori penganggur ada sekitar 3 orang.

3.2.1. Pengangguran Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal

Jika kita lihat Gambar 4, TPT kelompok umur (15-29) tahun mempunyai persentase yang paling tinggi dibandingkan pada kelompok-kelompok umur lain, baik pada laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut mencerminkan bahwa masalah pengangguran yang utama adalah pada penduduk muda (*youth unemployment*).

Gambar 4
TPT Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Indonesia Hasil SP2010



Berdasarkan Gambar 4, jika TPT dibedakan menurut kelompok umur dan daerah tempat tinggal, perbedaan yang mencolok adalah pada usia muda (15-29 tahun). TPT usia muda di perkotaan jauh lebih tinggi daripada di perdesaan.

Lain halnya jika dibedakan menurut kelompok umur dan jenis kelamin, TPT perempuan lebih tinggi dari pada TPT laki-laki pada setiap kelompok umur. Perbedaan yang mencolok terjadi pada kelompok umur (30-34) tahun sampai (40-44) tahun, TPT perempuan jauh lebih tinggi daripada TPT laki-laki (mencapai tiga kali lipat). Hal tersebut mengindikasikan adanya kesulitan yang lebih untuk memperoleh pekerjaan pada perempuan dibandingkan laki-laki, terutama pada kelompok-kelompok umur tersebut.

- Masalah Pengangguran yang utama pada penduduk usia muda
- TPT usia muda perkotaan jauh lebih tinggi daripada perdesaan
- TPT perempuan lebih tinggi daripada TPT laki-laki pada setiap kelompok umur

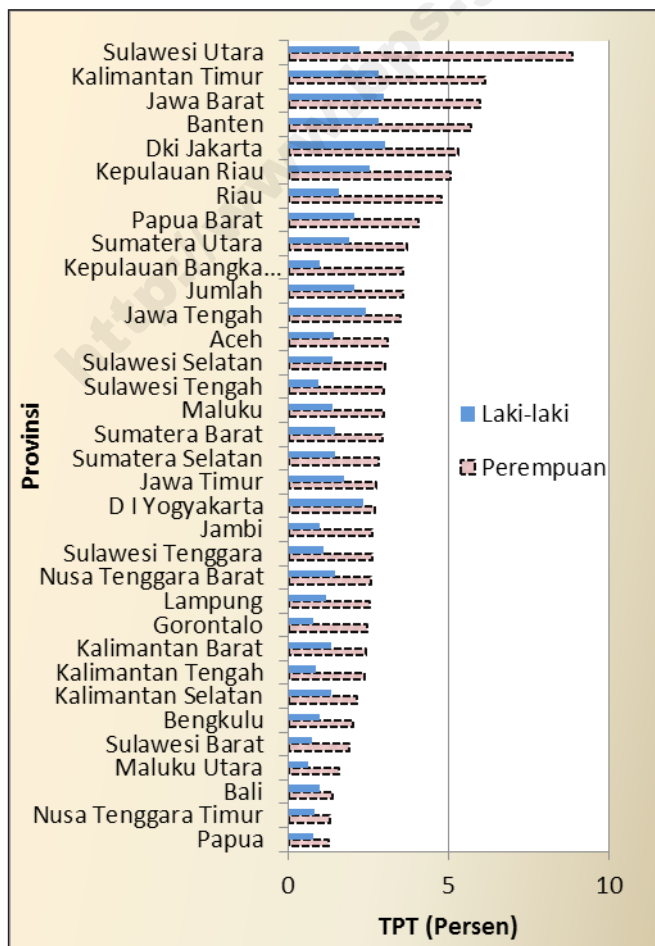
3.2.2. Pengangguran Menurut Provinsi, Jenis kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal

Tiga provinsi dengan TPT paling tinggi yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Jawa Barat dan DKI Jakarta yaitu masing-masing sebesar 4,2 persen, 3,9 persen dan 3,8 persen. Sementara provinsi dengan tingkat pengangguran terkecil yaitu: Maluku Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur dengan persentase sebesar 1,0 persen.

Berdasarkan Gambar 5, TPT untuk perempuan paling tinggi ada di Provinsi Sulawesi Utara (8,9 persen), kemudian disusul Kalimantan Timur (6,1 persen) dan Jawa Barat (6,0 persen). Sedangkan TPT perempuan yang paling kecil adalah Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Bali yaitu 1,2 persen, 1,3 persen, dan 1,4 persen.

- Tiga provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi yaitu Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan DKI Jakarta
- Tiga provinsi dengan TPT perempuan tertinggi yaitu di Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat.

Gambar 5
TPT Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin di Indonesia, Hasil SP2010



Jika dilihat TPT per provinsi di daerah perkotaan lebih tinggi daripada di daerah perdesaan, hal ini diduga karena tingkat selektifitas penduduk perkotaan lebih tinggi daripada penduduk perdesaan atau karena kurangnya ketersediaan lowongan di daerah perkotaan (Lampiran-Tabel L.5).

3.2.3. Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Jenis Kelamin, dan Daerah tempat Tinggal

Bila dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, penganggur dengan tingkat pendidikan menengah atas (SM Kejuruan dan SLTA/MA/ sederajat) memiliki TPT paling tinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 5,4 persen dan 4,8 persen. Penganggur yang tidak/belum pernah sekolah mempunyai TPT paling kecil yaitu sebesar 0,6 persen.

Tabel 3
TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Indonesia, Hasil SP2010

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	TPT				Total
	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		
	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak/belum pernah sekolah	0,4	0,7	1,1	0,4	0,6
Tidak/belum tamat SD	0,7	1,3	1,7	0,7	1,0
SD/MI/Sederajat	1,0	2,2	2,1	1,1	1,4
SLTP/MTs/sederajat	2,5	5,3	4,1	2,8	3,5
SLTA/MA/sederajat	3,7	7,4	5,2	3,9	4,8
SM Kejuruan	4,6	7,4	5,5	4,9	5,4
Diploma I/II	2,0	2,4	2,9	1,4	2,2
Diploma III	2,7	3,9	3,4	2,6	3,2
Diploma IV/Universitas	2,1	3,4	2,8	2,0	2,6
S2/S3	0,5	1,2	0,7	0,7	0,7
Nasional	2,0	3,6	3,6	1,7	2,6

Lebih lanjut, penganggur perempuan yang mempunyai tingkat pengangguran paling tinggi adalah mereka yang berpendidikan SLTA/MA/ sederajat dan SM Kejuruan yaitu sebesar 7,4 persen. Sementara itu untuk penganggur perempuan yang tidak/belum pernah sekolah mempunyai tingkat pengangguran yang paling kecil, yaitu hanya sebesar 0,7 persen.

Untuk penganggur laki-laki, TPT paling tinggi terjadi pada mereka yang berpendidikan Sekolah Menengah (SM) Kejuruan yaitu sebesar

- Angkatan kerja Indonesia dengan pendidikan SM Kejuruan memiliki TPT yang paling tinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya.
- TPT di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan untuk semua jenjang pendidikan, dan sama pada tingkat pendidikan S2/S3.

4,6 persen. Penganggur laki-laki yang berpendidikan SLTA/MA/ sederajat menempati posisi kedua tertinggi yaitu sebesar 3,7 persen. Sedangkan TPT terendah, pada mereka yang tidak/belum pernah sekolah yaitu sebesar 0,4 persen.

Jika dibedakan menurut jenjang pendidikan dan daerah tempat tinggal, TPT di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan untuk semua jenjang pendidikan kecuali pada S2/S3 mempunyai TPT yang sama yaitu sebesar 0,7 persen.

3.3. Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan

Pada Sensus Penduduk 2010, klasifikasi lapangan pekerjaan yang digunakan adalah (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009 yang telah dimodifikasi, dan merujuk pada ISIC (*International Standard Industrial Classification*) Revisi 4. Lapangan pekerjaan diklasifikasikan menjadi 19 kategori, dimana kategori 1 sampai 6 merupakan sub sektor pertanian. Sehingga dalam penulisan publikasi ini kategori 1 sampai dengan 6 dapat digabung menjadi kategori pertanian.

3.3.1. Penduduk Bekerja Menurut lapangan Pekerjaan, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal

Berdasarkan Hasil SP2010, ternyata lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling besar di Indonesia adalah 'Pertanian' yaitu sekitar 42,5 juta pekerja. Disusul oleh 'Perdagangan' dan 'Industri Pengolahan', yang masing-masing dapat menyerap sekitar 17,1 juta dan 11,3 juta pekerja. Lapangan Pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling sedikit adalah 'Listrik dan Gas' yaitu hanya sebesar 382 ribu pekerja.

Apabila dibandingkan menurut jenis kelamin, lapangan pekerjaan yang lebih banyak menyerap tenaga kerja perempuan dibanding laki-laki adalah 'Jasa Pendidikan' dan 'Jasa Kesehatan'. Sementara lapangan pekerjaan selain itu, lebih banyak menyerap tenaga kerja laki-laki.

Jika diperhatikan menurut komposisi daerah tempat tinggal, dua kategori yaitu 'Pertanian' serta Pertambangan dan Penggalian' lebih banyak menyerap tenaga kerja di perdesaan. Sementara kategori-kategori selain itu lebih banyak menyerap tenaga kerja di perkotaan.

Lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja perkotaan adalah 'Perdagangan', 'Jasa Kemasyarakatan' dan 'Industri Pengolahan', masing-masing sekitar 11,4 juta, 8,3 juta dan 7,7 juta pekerja. Untuk perdesaan, lapangan pekerjaan yang memegang peranan paling penting dalam penyerapan tenaga kerja adalah kategori 'Pertanian' (sekitar 36,0

- *Lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling besar adalah kategori 'Pertanian'.*
- *Jasa Pendidikan' dan 'Jasa Kesehatan' lebih banyak menyerap tenaga kerja perempuan.*
- *Di daerah perkotaan , tiga kategori yang memegang peranan penting yaitu: 'Perdagangan', 'Jasa Kemasyarakatan' dan 'Industri Pengolahan'*

juta pekerja), 'Perdagangan' (sekitar 5,8 juta pekerja) dan 'Industri Pengolahan' (sekitar 3,6 juta pekerja).

Tabel 4
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Indonesia, Hasil SP2010 (Dalam Ribuan Jiwa)

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Pertanian	26 349	16 149	6 468	36 031	42 499
	a. Pertanian Tanaman Padi dan Palawija	15 091	10 789	3 991	21 889	25 880
	b. Holtikultura	1 347	942	518	1 771	2 289
	c. Perkebunan	6 566	3 319	765	9 120	9 885
	d. Perikanan	1 773	172	680	1 266	1 946
	e. Peternakan	1 264	850	438	1 676	2 114
	f. Kehutanan dan Pertanian lainnya	308	77	76	309	385
02	Pertambangan dan Penggalian	1 017	112	474	655	1 129
03	Industri Pengolahan	6 459	4 840	7 716	3 583	11 299
04	Listrik dan Gas	341	40	305	77	382
05	Konstruksi	5 415	123	3 381	2 158	5 539
06	Transportasi dan Pergudangan	4 653	108	3 114	1 647	4 761
07	Perdagangan	9 172	7 963	11 353	5 782	17 135
08	Hotel dan Rumah Makan	1 168	995	1 659	504	2 163
09	Informasi dan Komunikasi	497	151	568	79	648
10	Keuangan dan Asuransi	711	402	989	124	1 113
11	Jasa Kesehatan	427	715	859	284	1 143
12	Jasa Pendidikan	1 853	2 390	2 509	1 734	4 243
13	Jasa Kemasyarakatan, Pemerintahan, dan Perorangan	7 497	3 658	8 267	2 889	11 156
14	Lainnya	1 227	491	1 238	480	1 718
	Jumlah	66 788	38 140	48 901	56 027	104 928

3.3.2. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Provinsi

Hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia ternyata 'Pertanian' masih menjadi lapangan pekerjaan utama, yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

'Pertanian' masih menjadi lapangan pekerjaan utama di hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Hanya ada tiga provinsi yang lapangan pekerjaan utama penduduknya bukan 'Pertanian' yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Kepulauan Riau. Penduduk di DKI Jakarta paling banyak bekerja pada lapangan pekerjaan 'Perdagangan' yaitu mencapai 25,4 persen dari total pekerja. Lain halnya dengan Kepulauan Riau dan Banten, lapangan pekerjaan utama penduduknya adalah 'Industri Pengolahan' dengan proporsi masing-masing sebesar 27,9 persen dan 23,9 persen (Lampiran-Tabel L.6).

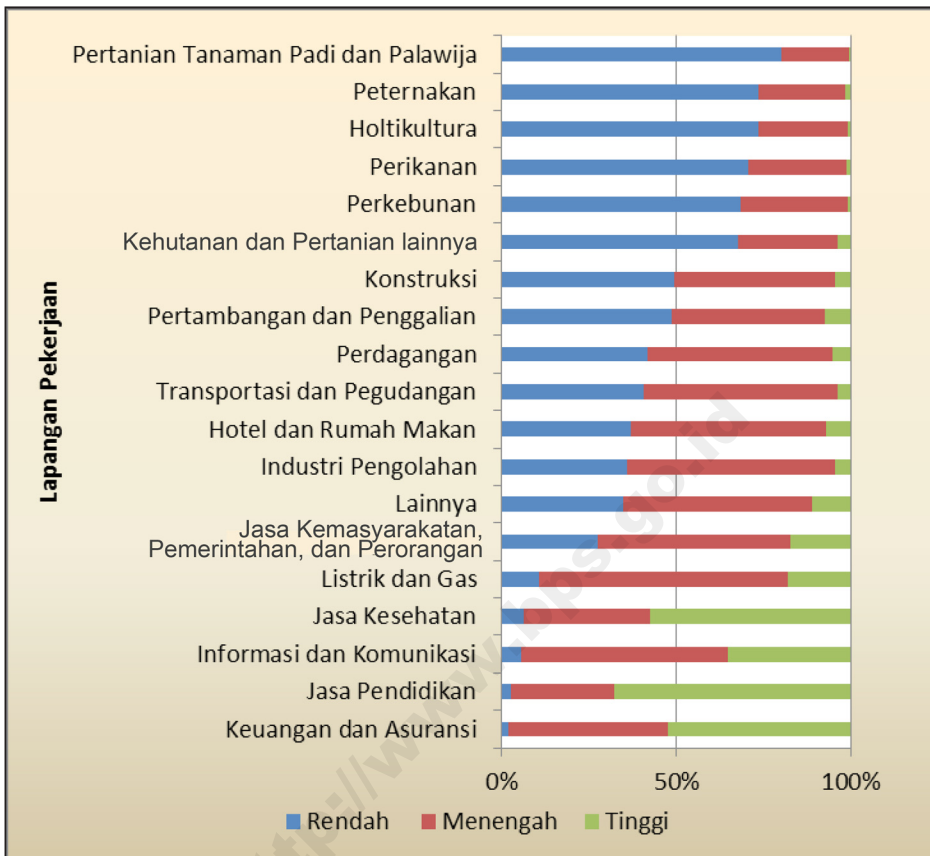
3.3.3. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan

Untuk memudahkan analisa tingkat pendidikan dibagi menjadi rendah, menengah dan tinggi. Rendah yaitu mereka yang berpendidikan SD ke bawah, menengah yaitu mereka yang berpendidikan SLTP/ MTs/ sederajat dan SLTA/MA/ sederajat, sedangkan tinggi untuk mereka yang berpendidikan Diploma I/II ke atas.

Seperti tampak pada Gambar 6, lapangan pekerjaan yang didominasi oleh pekerja berpendidikan rendah yaitu: 'Pertanian Tanaman Padi dan Palawija', 'Peternakan', 'Hortikultura', 'Perikanan', 'Perkebunan', 'Kehutanan', 'Kontruksi' dan 'Pertambangan dan Penggalan'. Lapangan pekerjaan yang didominasi oleh pekerja yang berpendidikan tinggi yaitu 'Jasa Pendidikan', 'Jasa Kesehatan' dan 'Keuangan dan Asuransi'. Sementara lapangan pekerjaan selain itu didominasi oleh pekerja yang berpendidikan menengah.

- *Kategori lapangan pekerjaan yang didominasi oleh pekerja berpendidikan tinggi yaitu 'Jasa Pendidikan', 'Jasa Kesehatan' dan 'Keuangan dan Asuransi'.*
- *Selain kategori pertanian, lapangan pekerjaan yang lebih banyak menyerap tenaga kerja berpendidikan rendah adalah 'Kontruksi dan 'Pertambangan dan Penggalan'.*

Gambar 6
Distribusi Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan di Indonesia, Hasil SP2010

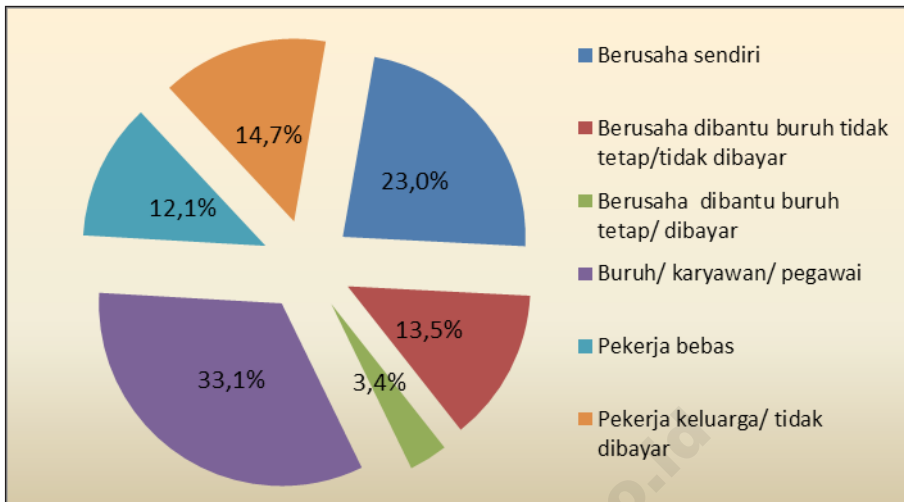


3.4. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Kategori status pekerjaan utama pada SP2010 ini dibedakan menjadi 6 (enam), yaitu:

1. Berusaha sendiri
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar
3. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar
4. Buruh atau karyawan atau pegawai
5. Pekerja bebas
6. Pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.

Gambar 7
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Indonesia,
Hasil SP2010



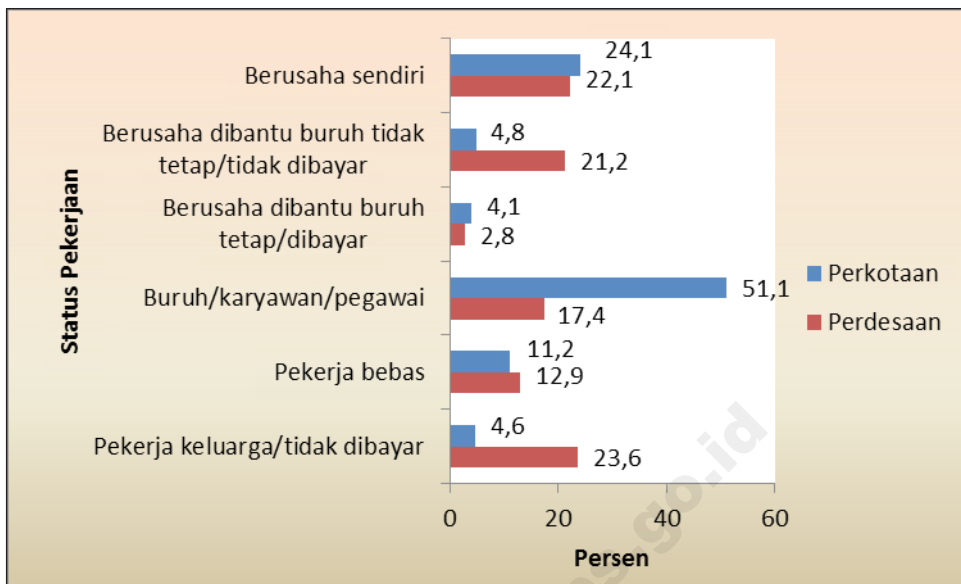
Berdasarkan hasil SP2010, penduduk yang bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai paling tinggi, sebesar 33,1 persen. Sementara penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar paling rendah, sebesar 3,4 persen (Gambar 7).

3.4.1. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal

Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal (perkotaan/perdesaan), terdapat perbedaan komposisi yang cukup berarti antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, sebagian besar penduduk bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 51,1 persen dan yang paling rendah berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, yaitu sebesar 4,1 persen (Gambar 8).

Pekerja di perkotaan berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai mencapai 51,1 persen.

Gambar 8
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan
Daerah Tempat Tinggal di Indonesia, Hasil SP2010



Sementara di perdesaan, hasil SP2010 menunjukkan bahwa status pekerja keluarga/tidak dibayar masih menempati porsi terbesar, yaitu sebesar 23,6 persen. Angka ini lebih tinggi dari pekerja dengan status berusaha sendiri (22,1 persen) dan pekerja yang berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar (21,2 persen). Bahkan bertolak belakang dengan daerah perkotaan, porsi buruh/karyawan/pegawai hanya sebesar 17,4 persen. Di daerah perdesaan ini, pekerja dengan status berusaha dengan buruh tetap/dibayar paling kecil dibandingkan yang lainnya, yaitu hanya 2,8 persen (Gambar 8).

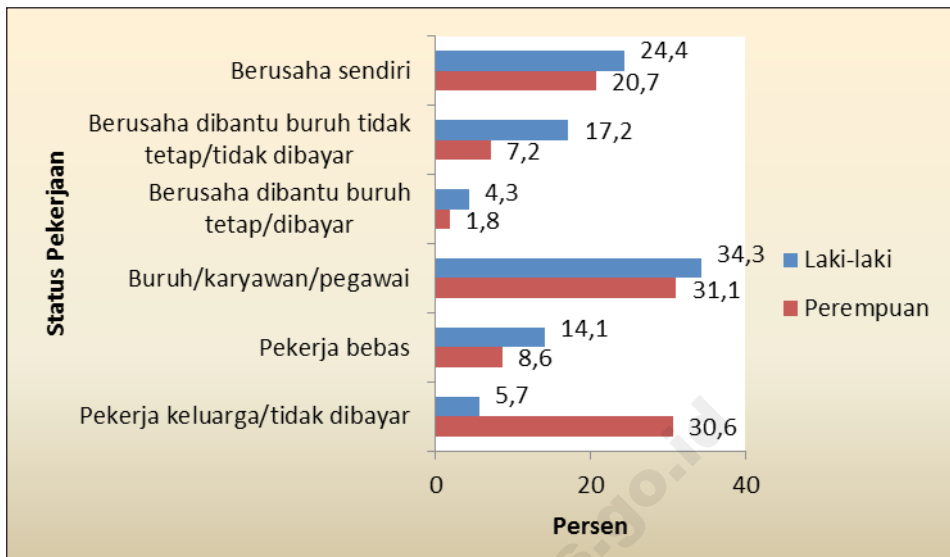
Pekerja di perdesaan berstatus sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar mencapai 23,6 persen.

3.4.2. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin

Tampak pada Gambar 9, jika dibedakan menurut jenis kelamin, terdapat perbedaan komposisi status pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Pekerja laki-laki yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 34,3 persen dan hanya sebagian kecil yang bekerja dengan status sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar (5,7 persen).

Persentase penduduk laki-laki yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai mencapai 34,3 persen.

Gambar 9
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin
di Indonesia, Hasil SP2010



Sementara itu, pada pekerja perempuan, pekerja dengan status sebagai pekerja keluarga/tak dibayar relatif masih tinggi (30,6 persen). Angka ini hampir sama dengan pekerja perempuan dengan status buruh/karyawan/pegawai (31,1 persen). Baik pekerja laki-laki maupun perempuan dengan status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar masih kecil yaitu masing-masing sebesar 4,3 persen dan 1,8 persen.

Penduduk perempuan yang bekerja berstatus sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar mencapai 30,6 persen.

3.4.3. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Provinsi

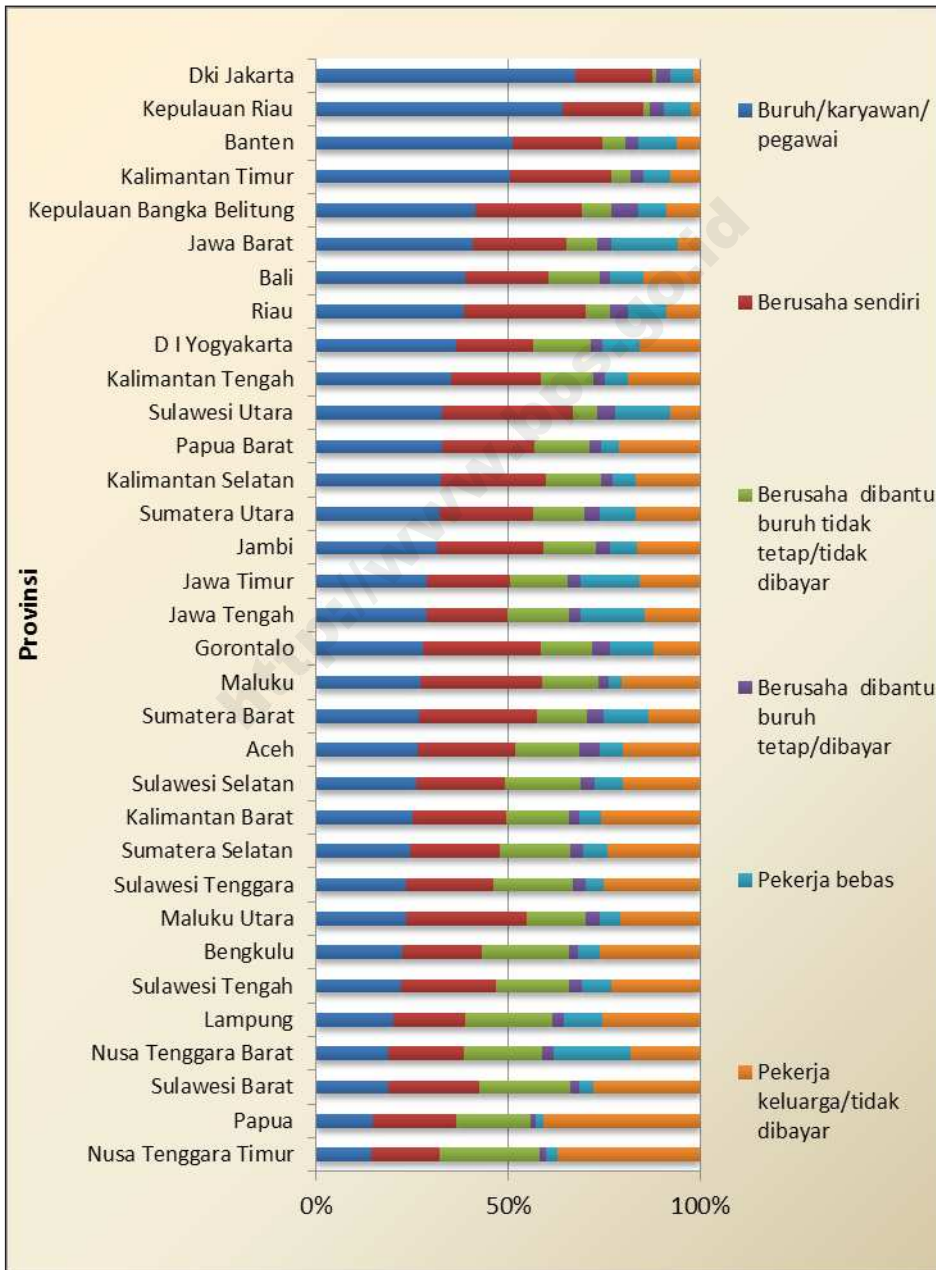
Berdasarkan hasil SP2010, terdapat variasi antar provinsi dalam komposisi pekerja dilihat menurut status pekerjaannya.

Terdapat empat provinsi yang proporsi buruh/karyawan/pegawainya sangat dominan atau di atas 50 persen, yaitu Provinsi DKI Jakarta tertinggi dengan 67,7 persen, diikuti Provinsi Kepulauan Riau (64,1 persen), Banten (51,0 persen), dan Kalimantan Timur (50,6 persen).

Penduduk bekerja di Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Banten, dan Kalimantan Timur didominasi oleh pekerja dengan status buruh/karyawan pegawai, masing-masing dengan 67,7 persen, 64,1 persen, 51,0 persen, dan 50,6 persen.

Dari Gambar 10, dapat dilihat bahwa terdapat kecenderungan, semakin besar pekerja berstatus buruh/karyawan/pegawai, maka semakin kecil pekerja keluarga/tidak dibayar. Misalnya Provinsi DKI, Kepulauan Riau dan Banten yang proporsi buruh/karyawan/pegawainya tinggi, maka proporsi pekerja keluarga/tidak dibayarnya rendah.

Gambar 10
Proporsi Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan di Indonesia,
Hasil SP2010



4. PERBANDINGAN KETENAGAKERJAAN ANTARA SP1990, SP2000, DAN SP2010

4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

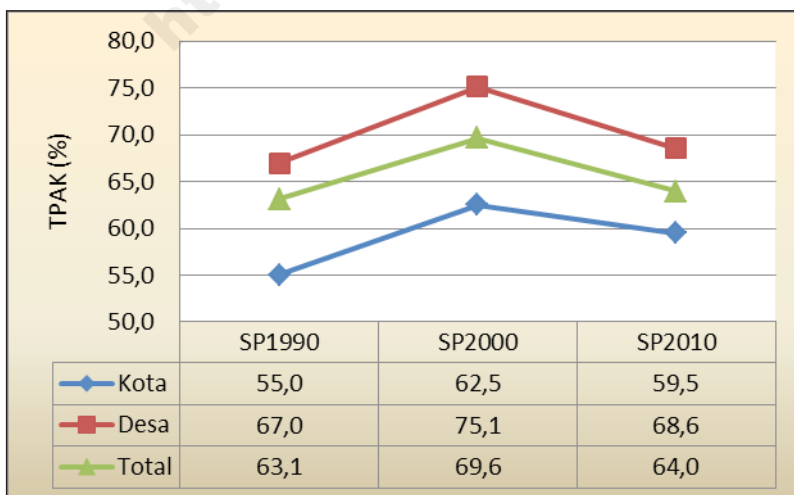
TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Ukuran ini merupakan indikasi relatif dari pasokan tenaga kerja tersedia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa. TPAK dihitung dengan menyatakan jumlah orang dalam angkatan kerja sebagai persentase dari penduduk usia kerja.

Secara nasional, terjadi kenaikan TPAK sebesar lebih dari enam persen pada tahun 2000 dibandingkan tahun 1990, dari 63,1 persen menjadi 69,6 persen, kemudian pada 2010 kembali turun lebih dari lima persen menjadi 64,0 persen (Gambar 11).

Fluktuasi yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan, TPAK tahun 1990 adalah 55,0 persen, lalu bertambah lebih dari tujuh persen pada tahun 2000 menjadi 62,5 persen, kemudian turun kembali sekitar tiga persen pada tahun 2010 menjadi 59,5 persen.

Selama kurun waktu 1990–2010, TPAK di perkotaan dan perdesaan memiliki tren yang hampir sama, yaitu meningkat pada tahun 2000 dibandingkan tahun 1990 dan menurun pada 2010 terhadap 2000

Gambar 11
Perkembangan TPAK Indonesia Menurut Daerah Tempat Tinggal, 1990-2010

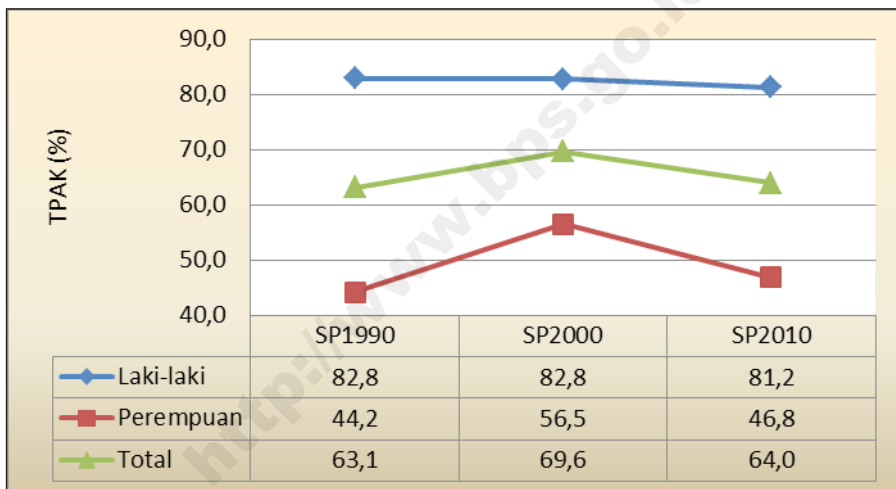


Sementara di perdesaan, TPAK tahun 1990 adalah 67,0 persen, lalu bertambah sekitar delapan persen pada tahun 2000 menjadi 75,1 persen, kemudian turun kembali lebih dari enam persen pada 2010 menjadi 68,6 persen (Gambar 11).

Dilihat dari sisi gender, TPAK laki-laki relatif stabil dari tahun 1990 hingga 2010, yang berada di kisaran antara 81 hingga 83 persen. Sementara itu TPAK perempuan tren perubahannya hampir sama dengan tren TPAK nasional, yaitu meningkat sekitar dua belas persen pada tahun 2000 terhadap tahun 1990, dari 44,2 persen menjadi 56,5 persen, lalu turun kembali lebih dari sembilan persen pada tahun 2010 menjadi 46,8 persen (Gambar 12).

- Selama kurun waktu 1990–2010, TPAK laki-laki relatif stabil.
- TPAK perempuan berfluktuatif, meningkat pada tahun 2000 terhadap 1990 dan menurun pada 2010 terhadap 2000.

Gambar 12
Perkembangan TPAK Indonesia Menurut Jenis Kelamin, 1990–2010



4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

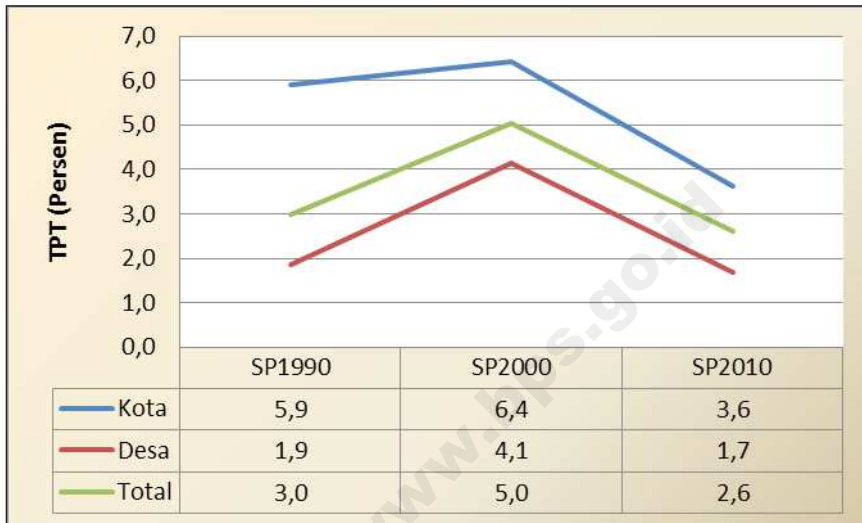
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan tersedia untuk bekerja.

Tingkat pengangguran dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tetapi, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan.

TPT Indonesia naik dua persen pada tahun 2000 terhadap TPT tahun 1990, yaitu dari 3,0 persen menjadi 5,0 persen. Kemudian mengalami penurunan hampir separuhnya menjadi 2,6 persen pada tahun 2010.

Berdasarkan hasil SP1990, SP2000, dan SP2010, TPT Indonesia naik dua persen pada tahun 2000 terhadap TPT tahun 1990, yaitu dari 3,0 persen di tahun 1990 menjadi 5,0 persen di tahun 2000. Kemudian mengalami penurunan hampir separuhnya menjadi 2,6 persen pada tahun 2010. Tingginya TPT pada tahun 2000 kemungkinan terjadi disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 (Gambar 13).

Gambar 13
Perkembangan TPT Indonesia Menurut Daerah Tempat Tinggal, 1990-2010

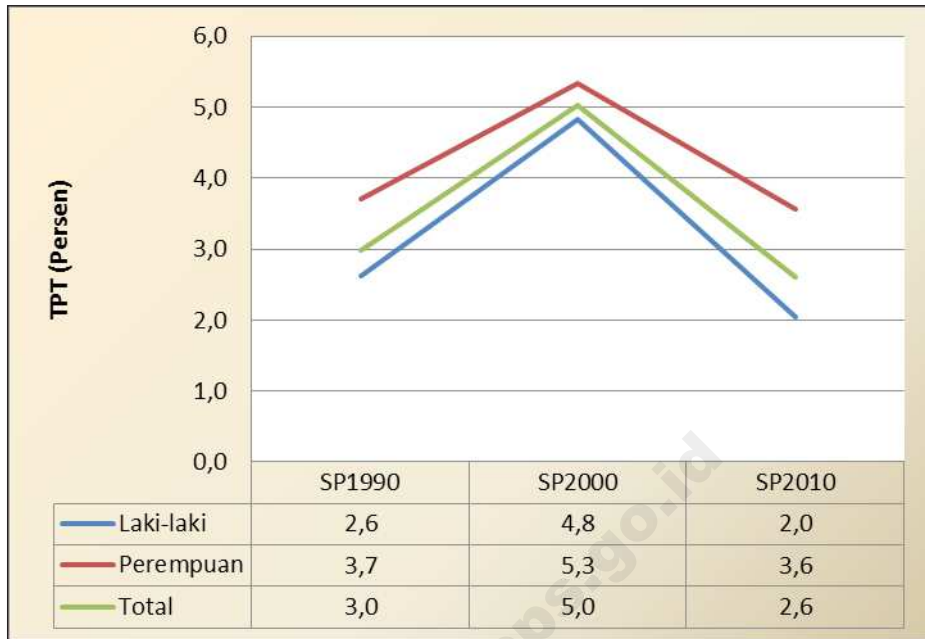


Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal (Gambar 13), pola yang sama dengan nasional terjadi di perdesaan, dimana TPT meningkat lebih dua kali pada tahun 2000 menjadi 4,1 persen dibanding tahun 1990 yang hanya 1,9 persen, kemudian turun kembali lebih dari separuhnya menjadi hanya 1,7 persen pada tahun 2010. Sementara di perkotaan sedikit berbeda, dimana pada tahun 2000 meningkat tipis menjadi 6,4 persen dibanding 5,9 persen pada 1990, lalu pada 2010 turun hampir separuhnya dibanding tahun 2000 menjadi 3,6 persen.

Sementara itu, jika ditinjau dari sisi gender, perubahan TPT laki-laki dan perempuan memiliki pola perubahan yang hampir sama, yaitu naik cukup berarti pada 2000, lalu kembali turun pada 2010. TPT laki-laki meningkat dari 2,6 persen pada 1990 menjadi 4,8 persen pada 2000, lalu turun menjadi 2,0 persen pada 2010. Sementara TPT perempuan dari 3,7 persen pada 1990 meningkat menjadi 5,3 persen pada 2000 lalu pada 2010 turun kembali menjadi 3,6 persen (Gambar 14).

Perubahan TPT laki-laki dan perempuan memiliki pola perubahan yang hampir sama, yaitu naik cukup berarti pada 2000, lalu kembali turun pada 2010.

Gambar 14
Perkembangan TPT Indonesia Menurut Jenis Kelamin, 1990-2010



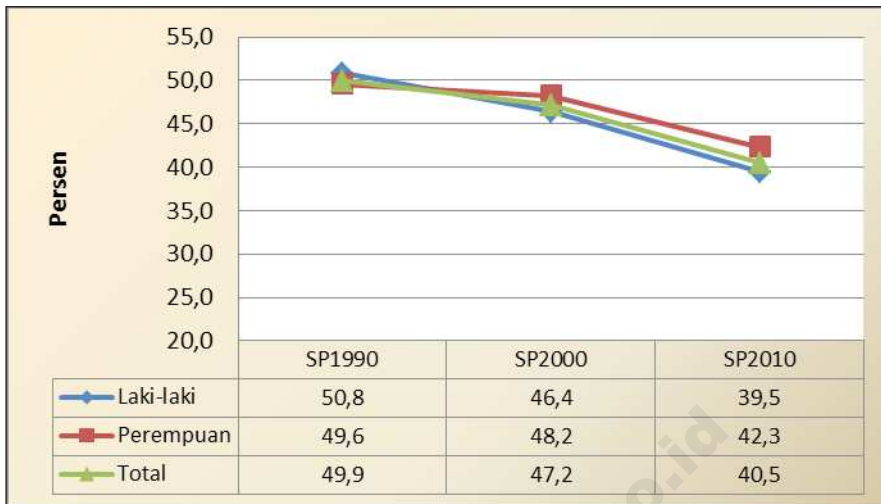
4.3. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan

Informasi sektoral atau lapangan pekerjaan biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan sektoral. Secara umum, tenaga kerja berpindah dari pertanian dan aktifitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa; dalam prosesnya, pekerja berpindah dari desa ke kota.

Untuk kepentingan perbandingan antar sensus, lapangan usaha dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pertanian dan non pertanian (Lampiran-Catatan Teknis).

Berdasarkan hasil SP1990, SP2000 dan SP2010, secara nasional terlihat bahwa terdapat tren menurun proporsi pekerja di sektor pertanian, dimana pekerja sektor pertanian pada tahun 1990 sebesar 49,9 persen turun menjadi 47,2 persen di tahun 2000 dan 40,5 persen di tahun 2010 (Gambar 15).

Gambar 15
Perkembangan Proporsi Pekerja Sektor Pertanian di Indonesia,
1990-2010

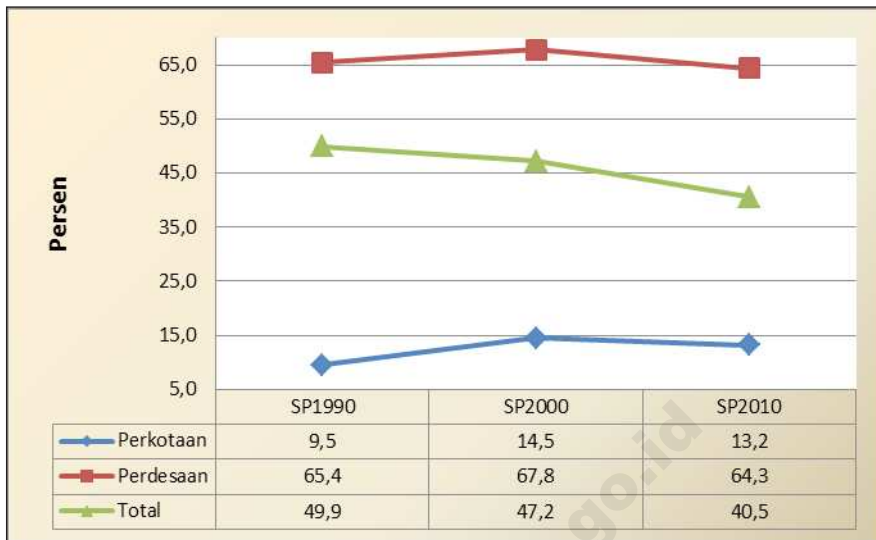


Jika dilihat dari sisi gender, proporsi pekerja laki-laki di sektor pertanian mengalami tren penurunan yang lebih cepat dibandingkan proporsi pekerja perempuan di sektor pertanian. Proporsi pekerja laki-laki di sektor pertanian pada tahun 1990 sebesar 50,8 persen, lalu turun menjadi 46,4 persen pada tahun 2000 dan pada tahun 2010 turun menjadi 39,5 persen. Sementara proporsi pekerja perempuan, pada tahun 1990 sebesar 49,6 persen, lalu menjadi 48,2 persen pada 2000, kemudian menjadi 42,3 persen (Gambar 15).

Selama kurun waktu 1990-2010, proporsi pekerja laki-laki di sektor pertanian mengalami tren penurunan yang lebih cepat daripada proporsi pekerja perempuan di sektor pertanian.

Jika ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, tren perubahan proporsi pekerja di sektor pertanian di perkotaan dan perdesaan memiliki pola yang hampir sama. Di perkotaan, proporsi pekerja di sektor pertanian yang di tahun 1990 hanya 9,5 persen, naik menjadi 14,5 persen di tahun 2000, lalu turun tipis menjadi 13,2 persen di tahun 2010. Sementara di perdesaan, proporsi pekerja di sektor pertanian di tahun 2000 bertambah sekitar 2,4 persen menjadi 67,8 persen dibandingkan tahun 1990, kemudian turun 3,5 persen pada tahun 2010 menjadi 64,3 persen (Gambar 16).

Gambar 16
Perkembangan Proporsi Pekerja Sektor Pertanian Menurut Daerah Tempat Tinggal di Indonesia, 1990-2010

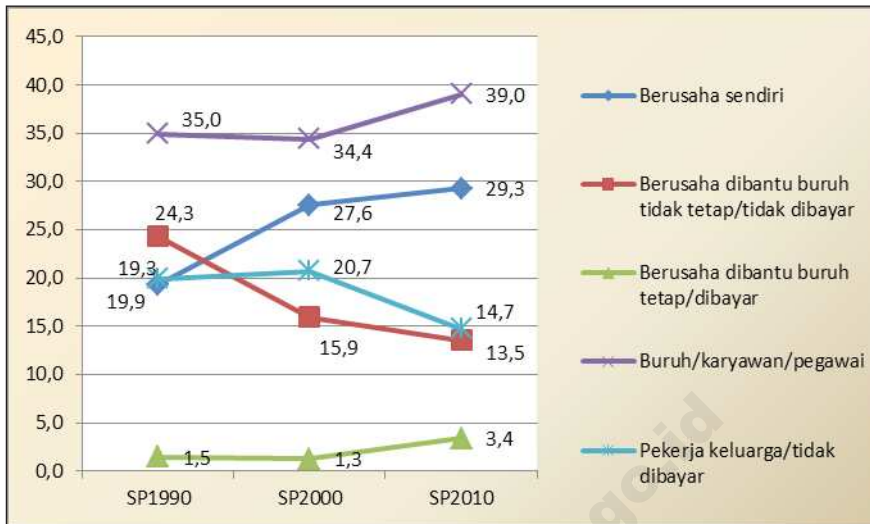


4.4. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Untuk menjaga keterbandingan antar SP, maka data SP2010 disesuaikan menjadi lima kategori, dimana 'pekerja bebas' di sektor pertanian dimasukkan ke dalam status buruh/karyawan/pegawai, dan pekerja bebas non pertanian dimasukkan ke dalam status berusaha sendiri (Lampiran-Catatan Teknis).

Berdasarkan hasil SP1990, SP2000, dan SP2010, pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai paling tinggi dibandingkan dengan pekerja status yang lain. Terjadi tren yang cenderung naik dari 1990 hingga 2010, dimana tahun 1990 persentase buruh/karyawan/pegawai mencapai 35,0 persen, lalu menurun tipis menjadi 34,4 persen pada tahun 2000, kemudian naik kembali menjadi 39,0 persen pada 2010.

Gambar 17
Perkembangan Persentase Penduduk Bekerja Menurut
Status Pekerjaan di Indonesia, 1990-2010



Pekerja dengan status pekerja keluarga/tidak dibayar dan pekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, mengalami tren menurun dari 1990 hingga 2010. Pekerja keluarga/tidak dibayar dari 19,9 persen pada tahun 1990, naik tipis menjadi 20,7 persen pada 2000, lalu turun 6,0 persen pada tahun 2010 menjadi 14,7 persen.

Sementara itu, pekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar turun sebesar 8,4 persen pada 2000 dibandingkan tahun 1990, lalu turun 2,4 persen pada tahun 2010 dibanding 2000 menjadi 13,5 persen.

Selama kurun waktu 1990–2010, pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai meningkat dari 35,0 persen menjadi 39,0 persen dan pekerja dengan status berusaha sendiri meningkat dari 19,3 persen menjadi 29,3 persen.

5. PENUTUP

Publikasi ketenagakerjaan hasil SP2010 ini, yang merupakan ringkasan ketenagakerjaan hasil SP2010, menyajikan analisis deskriptif secara ringkas dan sederhana beberapa indikator ketenagakerjaan hasil SP2010.

Beberapa indikator ketenagakerjaan yang disajikan adalah angkatan kerja, pengangguran, penduduk bekerja menurut status pekerjaan dan lapangan usaha, yang dirinci menurut golongan umur dan pendidikan juga menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan), secara nasional dan provinsi.

Membandingkan data ketenagakerjaan hasil SP2010 dengan sumber lain harus dilakukan secara hati-hati. Beberapa konsep dan definisi variabel dan struktur ketenagakerjaan dalam SP2010 tidak sama dengan SP sebelumnya, seperti pengangguran, lapangan usaha dan status pekerjaan (Lampiran-Catatan Teknis).

Walaupun disajikan secara ringkas dan sederhana, publikasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum kondisi ketenagakerjaan Indonesia tahun 2010 berdasarkan hasil SP2010. Dengan gambaran umum kondisi ketenagakerjaan ini, diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah (pusat maupun daerah), pengusaha, peneliti, akademisi dan masyarakat luas secara umum.

Tabel-tabel yang disajikan, baik dalam pembahasan maupun pada lampiran, merupakan ringkasan tabel atau sebagian kecil dari tabel-tabel hasil SP2010. Untuk tabel-tabel yang lebih lengkap dan rinci, bisa diakses melalui *website* resmi SP2010 dengan alamat: <http://sp2010.bps.go.id>.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2010), *'Buku 6: Pedoman Pencacah Sensus Penduduk 2010*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (2010), *'Buku 7: Pedoman Kode Suku Bangsa, Kode Bahasa, dan Kode Wilayah Administrasi Sensus Penduduk 2010*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (2011), *Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia: Februari 2011*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (1992), *Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990*, seri S2, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (2001), *Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000*, seri L2.2, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Husmanns, R., F. Mehran, dan V. Verma (1992), *'Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment, and Underemployment: An ILO Manual on Concept and Method'*, ILO, Geneva. Edisi ke 2.
- Kawata, Hiroshi and Saori Naganuma (2010), *'Labor Force Participation Rate in Japan*, Bank of Japan Review.

<http://www.bps.go.id>

LAMPIRAN

<http://www.pbps.go.id>

CATATAN TEKNIS

Terdapat beberapa perbedaan konsep dan definisi antara SP2010 dengan SP2000 dan SP1990, berikut ditampilkan beberapa perbedaan yang ada.

Perbedaan Konsep Definisi antara SP1990, SP2000, SP2010

Perbedaan Konsep Definisi	SP1990	SP2000	SP2010
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang selama seminggu yang lalu:	1. Mempunyai pekerjaan (bekerja dan sementara tidak bekerja)	1. Mempunyai pekerjaan (bekerja dan sementara tidak bekerja)	1. Mempunyai pekerjaan (bekerja dan sementara tidak bekerja)
	2. Tidak punya pekerjaan dan mencari Pekerjaan	2. Tidak punya pekerjaan dan mencari Pekerjaan	2. Tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha
Pengangguran adalah mereka yang tidak punya pekerjaan tetapi sedang:	Mencari pekerjaan	Mencari Pekerjaan	Mencari Pekerjaan/ mempersiapkan usaha

Dalam pengklasifikasikan lapangan pekerjaan pada SP1990, SP2000 dan SP2010 terdapat cukup banyak perbedaan. Sehingga untuk dapat membandingkan tren pekerja per kategori harus ada penyesuaian kategori. Berikut ditampilkan tabel pengelompokan ulang (*regrouping*) lapangan pekerjaan SP1990, SP2000 dan SP2010.

Pengelompokan Ulang Lapangan Pekerjaan antara SP1990, SP2000, dan SP2010

Kategori	Klasifikasi Lapangan Pekerjaan		
	SP1990	SP2000	SP2010
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian	1. Pertanian , Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	1. Sub Kategori Pertanian Tanaman Pangan	1. Pertanian Tanaman Padi dan Palawija
		2. Sub Kategori Perkebunan	2. Holtikura
		3. Sub Kategori Perikanan	3. Perkebunan
		4. Sub Kategori Peternakan	4. Perikanan
		5. Sub Kategori Pertanian Lainnya	5. Peternakan
			6. Kehutanan dan Pertanian Lainnya
2. Non Pertanian	2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas, dan Air 5. Bangunan 6. Perdagangan, Rumah Makan, dan Hotel 7. Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi 8. Keuangan, Asuransi dan Usaha Persewaan Bangunan 9. Jasa-Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan 10. Kegiatan yang Tidak/ Belum Jelas	6. Kategori Industri Pengolahan	7. Pertambangan dan Penggalian
		7. Kategori Perdagangan	8. Industri Pengolahan
		8. Kategori Jasa	9. Listrik dan Gas
		9. Kategori Angkutan	10. Konstruksi/bangunan
		10. Kategori Lainnya	11. Perdagangan
			12. Hotel dan Rumah Makan
			13. Transportasi dan pergudangan
			14. Informasi dan Komunikasi
			15. Keuangan dan Asuransi
			16. Jasa Pendidikan
	17. Jasa kesehatan		
	18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan perorangan		
	19. lainnya		

Pada SP2010 ada kategori status pekerjaan yang ditambahkan yaitu Pekerja Bebas. Jika ingin membandingkan dengan hasil SP sebelumnya, pekerja bebas ini harus dikelompokkan ulang menjadi:

- a. Pekerja bebas di kategori pertanian (buruh tani), masuk ke buruh/karyawan.
- b. Pekerja bebas di kategori non pertanian masuk ke berusaha sendiri.

Perbedaan Status Pekerjaan antara SP1990, SP2000, dan SP2010

SP1990	SP2000	SP2010
(1)	(2)	(3)
1. Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain	1. Berusaha/bekerja sendiri	1. Berusaha Sendiri
2. Berusaha dengan dibantu ART/ buruh tidak tetap	2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap	2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar
3. Berusaha dengan buruh tetap	3. Berusaha dibantu dengan buruh tetap	3. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar
4. Buruh/karyawan	4. Buruh/karyawan/pekerja dibayar	4. Buruh/karyawan/ pegawai
5. Pekerja keluarga	5. Pekerja tak dibayar	5. Pekerja bebas
		6. Pekerja keluarga/tidak dibayar

Berikut rumus penghitungan indikator-indikator yang umum dipakai untuk mengetahui gambaran situasi ketenagakerjaan:

- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

- **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** adalah persentase pengangguran terhadap angkatan kerja

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

- **Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)** adalah peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja atau persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja

$$\text{TKK} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{TKK} = 100\% - \text{TPT}$$

Tabel L.1
TPAK menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan
Daerah Tempat Tinggal di Indonesia, Hasil SP2010

Kelompok Umur	TPAK				Total
	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		
	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15-19	29,2	22,3	23,1	28,7	25,8
20-24	71,6	44,1	55,6	60,2	57,7
25-29	90,2	48,8	67,5	71,7	69,4
30-34	95,4	50,8	69,7	77,0	73,1
35-39	96,8	53,8	71,0	80,2	75,5
40-44	97,1	57,7	72,6	82,6	77,5
45-49	96,8	59,5	72,7	83,6	78,2
50-54	95,1	57,9	70,4	82,8	76,8
55-59	89,4	54,1	63,0	81,0	72,5
60-64	81,9	46,6	51,0	73,5	63,6
65-69	74,3	39,4	42,6	66,1	55,9
70-74	63,1	28,8	32,3	52,3	44,0
75-79	54,1	21,6	25,3	42,5	35,5
80-84	41,1	14,2	18,0	30,6	25,6
85-89	32,7	10,4	13,6	23,8	19,7
90-94	26,2	7,6	11,1	16,8	14,6
95+	25,3	7,6	13,8	13,7	13,7
Nasional	81,2	46,8	59,5	68,6	64,0

Tabel L.2
TPAK menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal
di Indonesia, Hasil SP2010

Provinsi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja				Total
	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		
	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	77,2	44,9	54,2	63,5	60,8
Sumatera Utara	79,5	46,3	56,0	69,6	62,6
Sumatera Barat	78,1	43,9	55,0	64,2	60,5
Riau	82,0	32,8	55,1	60,1	58,1
Jambi	83,9	42,0	57,7	65,9	63,3
Sumatera Selatan	81,6	49,8	54,3	72,6	65,9
Bengkulu	83,1	55,6	59,6	74,2	69,6
Lampung	84,1	50,0	57,8	71,0	67,6
Kepulauan Bangka Belitung	85,4	34,8	57,3	65,1	61,2
Kepulauan Riau	86,6	41,5	65,8	58,6	64,6
Dki Jakarta	80,6	42,0	61,5	–	61,5
Jawa Barat	80,6	35,8	57,4	60,6	58,5
Jawa Tengah	82,2	55,5	64,8	71,7	68,6
D I Yogyakarta	77,6	59,7	63,1	79,1	68,4
Jawa Timur	82,4	51,3	62,0	70,5	66,4
Banten	78,5	36,8	58,5	57,2	58,1
Bali	83,1	64,5	69,9	79,8	73,8
Nusa Tenggara Barat	77,5	53,2	58,2	69,5	64,7
Nusa Tenggara Timur	81,2	65,7	52,2	78,9	73,2
Kalimantan Barat	83,2	53,2	55,3	74,4	68,5
Kalimantan Tengah	86,1	51,3	60,8	74,0	69,5
Kalimantan Selatan	83,5	48,6	59,0	71,4	66,1
Kalimantan Timur	83,0	34,6	58,4	63,4	60,2
Sulawesi Utara	79,4	34,9	56,3	58,5	57,5
Sulawesi Tengah	84,2	47,3	56,7	69,3	66,1
Sulawesi Selatan	78,0	39,5	50,2	62,4	57,8
Sulawesi Tenggara	81,8	52,0	55,9	71,1	66,7
Gorontalo	80,7	40,0	56,4	62,2	60,2
Sulawesi Barat	85,0	55,3	61,0	72,9	70,0
Maluku	74,3	46,4	51,9	65,8	60,3
Maluku Utara	78,6	46,4	55,1	66,0	62,8
Papua Barat	77,4	44,5	53,3	65,9	62,0
Papua	83,6	68,3	56,1	83,8	76,3
Nasional	81,2	46,8	59,5	68,6	64,0

Tabel L.3
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu dan Tingkat Pendidikan di Indonesia, Hasil SP2010 (Dalam Ribuan Jiwa)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Kegiatan Seminggu yang Lalu				Penduduk Usia Kerja
	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja	
	Bekerja	Mencari pekerjaan	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak/belum pernah sekolah	8.236	46	8.282	4.970	13.252
Tidak/belum tamat SD	7.962	77	8.040	4.144	12.184
SD/MI/Sederajat	37.346	548	37.894	18.639	56.533
SLTP/MTs/ sederajat	18.311	654	18.966	16.062	35.028
SLTA/MA/ sederajat	21.327	1.073	22.400	13.773	36.172
SM Kejuruan	2.805	160	2.964	1.085	4.050
Diploma I/II	1.244	28	1.272	313	1.585
Diploma III	1.802	60	1.862	610	2.472
Diploma IV/Universitas	5.435	146	5.581	1.056	6.637
S2/S3	461	3	464	46	511
Jumlah	104.928	2.797	107.725	60.697	168.422

Tabel L.4
TPT Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Indonesia, Hasil SP2010

Kelompok Umur	TPT				Total
	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		
	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15-19	13,6	15,0	18,8	10,3	14,2
20-24	6,4	8,3	9,1	4,9	7,2
25-29	2,5	4,8	4,3	2,1	3,3
30-34	1,1	3,1	2,4	1,1	1,8
35-39	0,7	2,3	1,7	0,8	1,2
40-44	0,5	1,5	1,2	0,6	0,9
45-49	0,4	1,1	1,0	0,4	0,7
50-54	0,4	0,9	0,8	0,4	0,6
55-59	0,5	0,8	1,0	0,3	0,6
60-64	0,4	0,7	0,9	0,3	0,5
65+	0,3	0,6	0,7	0,2	0,4
Nasional	2,0	3,6	3,6	1,7	2,6

Tabel L.5
TPT Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Indonesia,
Hasil SP2010

Provinsi	TPT				Total
	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		
	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1,4	3,1	3,3	1,6	2,0
Sumatera Utara	1,9	3,7	3,8	1,5	2,6
Sumatera Barat	1,5	2,9	3,2	1,4	2,0
Riau	1,6	4,8	3,7	1,7	2,5
Jambi	1,0	2,6	2,5	1,1	1,5
Sumatera Selatan	1,4	2,8	3,6	1,2	2,0
Bengkulu	1,0	2,0	2,6	0,9	1,4
Lampung	1,2	2,5	3,0	1,3	1,7
Kep. Bangka Belitung	1,0	3,6	2,3	1,1	1,7
Kepulauan Riau	2,5	5,0	3,7	1,4	3,3
Dki Jakarta	3,0	5,3	3,8	-	3,8
Jawa Barat	3,0	6,0	4,4	2,8	3,9
Jawa Tengah	2,4	3,5	3,7	2,2	2,9
D I Yogyakarta	2,3	2,7	3,2	1,4	2,5
Jawa Timur	1,7	2,7	2,8	1,6	2,1
Banten	2,8	5,7	4,1	2,9	3,7
Bali	1,0	1,4	1,4	0,8	1,1
Nusa Tenggara Barat	1,5	2,6	3,0	1,3	2,0
Nusa Tenggara Timur	0,8	1,3	3,5	0,6	1,0
Kalimantan Barat	1,3	2,4	3,7	1,1	1,7
Kalimantan Tengah	0,9	2,4	2,3	1,0	1,4
Kalimantan Selatan	1,3	2,1	2,4	1,1	1,6
Kalimantan Timur	2,8	6,1	4,2	2,8	3,7
Sulawesi Utara	2,2	8,9	5,4	3,2	4,2
Sulawesi Tengah	0,9	3,0	3,3	1,2	1,7
Sulawesi Selatan	1,4	3,0	3,4	1,3	2,0
Sulawesi Tenggara	1,1	2,6	3,5	1,1	1,7
Gorontalo	0,8	2,4	2,0	1,0	1,3
Sulawesi Barat	0,7	1,9	2,1	1,0	1,2
Maluku	1,4	3,0	3,8	1,1	2,0
Maluku Utara	0,6	1,6	2,3	0,5	1,0
Papua Barat	2,1	4,0	5,1	1,9	2,7
Papua	0,8	1,2	3,6	0,3	1,0
Nasional	2,0	3,6	3,6	1,7	2,6

Tabel L.6
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Provinsi,
di Indonesia Hasil SP2010

Lapangan Pekerjaan	Aceh	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Riau	Jambi	Sumatera Selatan	Bengkulu	Lampung
(1)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pertanian	52,2	46,9	44,9	47,7	57,3	60,4	62,0	61,5
Pertanian tanaman padi dan palawija	29,8	19,6	25,1	5,6	9,1	19,0	16,3	34,7
Hortikultura	2,3	3,2	3,6	1,0	3,5	0,8	2,7	1,4
Perkebunan	15,7	20,6	13,0	37,9	42,8	38,8	41,6	22,5
Perikanan	3,6	2,5	1,6	2,1	1,2	1,2	0,9	1,6
Peternakan	0,5	0,7	1,3	0,3	0,4	0,3	0,3	1,2
Kehutanan dan Pertanian lainnya	0,2	0,2	0,3	0,8	0,4	0,3	0,1	0,2
Pertambangan dan pengalihan	0,5	0,4	1,2	1,5	1,2	0,9	0,9	0,3
Industri pengolahan	3,3	6,0	4,6	4,4	3,3	2,8	1,8	4,8
Listrik dan gas	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2
Konstruksi	5,1	5,3	4,9	5,1	4,2	4,2	3,3	3,3
Perdagangan	13,1	14,8	16,6	14,7	13,3	11,6	11,6	12,3
Hotel dan rumah makan	0,9	1,5	1,9	1,3	1,2	0,7	0,7	0,7
Transportasi dan pergudangan	3,7	5,4	5,4	4,0	3,6	3,8	2,7	3,3
Informasi dan komunikasi	0,3	0,5	0,5	0,5	0,3	0,4	0,3	0,3
Keuangan dan asuransi	0,4	0,8	0,7	0,8	0,6	0,5	0,5	0,4
Jasa pendidikan	6,8	4,4	6,1	5,1	4,8	3,6	4,5	3,4
Jasa kesehatan	1,8	1,3	1,4	1,2	1,0	1,0	1,2	0,7
Jasa kemasyarakatan, Pemerintahan, dan Perorangan	10,4	10,5	10,2	11,2	7,8	7,9	9,7	7,8
Lainnya	1,2	2,0	1,3	2,2	0,9	1,8	0,8	1,0
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Lanjutan

Tabel L.6
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Provinsi,
di Indonesia Hasil SP2010 (Lanjutan)

Lapangan Pekerjaan	Kep. Bangka Belitung	Kep. Riau	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	D I Yogyakarta	Jawa Timur	Banten	Bali
(1)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pertanian	32,7	13,1	1,0	24,7	39,2	33,7	44,7	19,0	31,2
Pertanian tanaman padi dan palawija	1,4	0,9	0,1	19,8	29,3	26,4	32,8	15,5	11,6
Hortikultura	1,5	1,1	0,2	1,9	3,3	2,0	2,2	0,7	3,1
Perkebunan	23,8	3,6	0,1	1,0	2,8	0,7	3,0	1,1	4,3
Perikanan	5,2	6,7	0,4	0,8	1,2	0,3	1,5	1,0	1,6
Peternakan	0,4	0,4	0,1	1,1	2,3	4,1	4,9	0,5	10,6
Kehutanan dan Pertanian lainnya	0,4	0,3	0,0	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1
Pertambangan dan penggalian	21,5	1,4	0,5	0,7	0,6	0,8	0,6	0,7	0,4
Industri pengolahan	2,9	27,9	15,6	17,6	14,8	10,4	11,1	23,9	11,1
Listrik dan gas	0,3	0,8	0,8	0,5	0,2	0,3	0,3	0,7	0,3
Konstruksi	6,0	8,7	4,7	6,3	6,5	5,9	4,9	4,9	7,6
Perdagangan	15,3	15,6	25,4	20,7	17,2	18,4	16,0	18,6	19,0
Hotel dan rumah makan	1,6	4,1	6,5	2,3	2,4	3,4	1,7	2,2	7,5
Transportasi dan pergudangan	2,6	5,8	7,0	6,2	3,4	2,7	3,6	6,9	3,3
Informasi dan komunikasi	0,4	0,9	2,6	0,9	0,4	1,0	0,4	1,0	0,5
Keuangan dan asuransi	0,8	1,1	4,7	1,3	0,8	1,3	0,9	1,7	2,0
Jasa pendidikan	4,0	3,8	3,3	3,8	3,5	5,7	3,7	3,9	3,3
Jasa kesehatan	1,2	1,4	2,1	1,1	0,9	1,6	0,9	1,2	1,2
Jasa kemasyarakatan, Pemerintahan, dan Perorangan	9,8	11,9	22,1	11,6	9,3	13,7	9,6	12,4	11,7
Lainnya	1,0	3,6	3,8	2,2	0,8	1,3	1,7	3,0	0,9
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel L.6
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Provinsi,
di Indonesia Hasil SP2010 (Lanjutan)

Lapangan Pekerjaan	Nusa Tenggara Barat (%)	Nusa Tenggara Timur (%)	Kalimantan Barat (%)	Kalimantan Tengah (%)	Kalimantan Selatan (%)	Kalimantan Timur (%)	Sulawesi Utara (%)	Sulawesi Tengah (%)
(1)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
Pertanian	53,0	68,5	62,6	57,2	43,1	29,3	35,2	58,9
Pertanian tanaman padi dan palawija	37,5	57,4	21,6	18,9	23,2	11,7	18,0	20,8
Holtikultura	2,6	2,2	1,7	1,6	0,9	2,0	3,2	1,7
Perkebunan	7,1	5,0	36,0	31,3	13,9	9,1	8,3	30,9
Perikanan	2,1	2,5	2,1	3,0	3,4	5,0	4,7	4,4
Peternakan	3,3	1,2	0,5	0,5	1,0	0,5	0,6	0,3
Kehutanan dan Pertanian lainnya	0,2	0,2	0,7	1,9	0,7	1,1	0,4	0,8
Pertambangan dan penggalian	1,7	1,5	2,3	4,9	4,3	8,8	2,5	1,5
Industri pengolahan	5,1	4,4	2,2	1,9	5,8	4,1	4,4	2,3
Listrik dan gas	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,8	0,4	0,2
Konstruksi	4,3	2,2	4,7	4,2	4,7	7,3	6,9	3,5
Perdagangan	13,7	5,4	10,8	11,8	16,9	16,9	15,4	11,2
Hotel dan rumah makan	0,9	0,3	0,8	0,7	2,4	2,0	2,1	0,7
Transportasi dan pergudangan	4,5	4,3	2,3	2,6	4,1	5,1	8,9	3,3
Informasi dan komunikasi	0,3	0,2	0,3	0,3	0,5	0,8	0,7	0,3
Keuangan dan asuransi	0,7	0,3	0,5	0,4	0,7	1,2	1,2	0,5
Jasa pendidikan	5,1	4,1	3,5	4,3	4,8	4,7	5,0	5,2
Jasa kesehatan	0,8	0,8	0,8	1,0	1,1	1,5	1,5	1,1
Jasa kemasyarakatan, Pemerintahan, dan Perorangan	8,9	7,2	7,4	9,0	10,3	13,8	14,4	10,2
Lainnya	0,8	0,6	1,4	1,4	1,0	3,5	1,4	0,9
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Lanjutan

Tabel L.6
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Provinsi,
di Indonesia Hasil SP2010 (Lanjutan)

Lapangan Pekerjaan	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat	Maluku	Maluku Utara	Papua Barat	Papua	Nasional
(1)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)
Pertanian	51,1	52,1	42,6	63,7	51,6	54,0	47,1	75,2	40,5
Pertanian tanaman padi dan palawija	33,4	21,5	33,8	16,3	29,3	19,8	20,9	61,1	24,7
Hortikultura	1,4	1,6	2,0	0,9	3,7	3,6	8,9	4,1	2,2
Perkebunan	10,0	19,9	2,1	39,6	9,7	24,9	5,2	3,2	9,4
Perikanan	4,7	7,8	4,1	4,7	7,4	4,7	8,1	2,8	1,9
Peternakan	1,4	0,6	0,2	2,0	0,3	0,2	0,3	0,5	2,0
Kehutanan dan Pertanian lainnya	0,1	0,7	0,4	0,1	1,2	0,8	3,7	3,5	0,4
Pertambangan dan penggalian	0,5	1,9	2,5	0,3	0,4	2,2	1,4	1,3	1,1
Industri pengolahan	4,5	4,1	4,9	4,6	2,7	1,6	2,3	0,7	10,8
Listrik dan gas	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,4	0,1	0,4
Konstruksi	4,9	4,2	4,2	2,9	3,6	4,3	6,4	2,2	5,3
Perdagangan	14,0	13,6	12,5	10,6	11,9	10,6	11,6	5,6	16,3
Hotel dan rumah makan	1,1	0,6	1,2	0,5	0,9	0,9	1,1	0,5	2,1
Transportasi dan pergudangan	5,1	4,5	7,4	2,9	6,2	6,8	6,6	2,9	4,5
Informasi dan komunikasi	0,5	0,3	0,4	0,1	0,4	0,3	0,4	0,2	0,6
Keuangan dan asuransi	0,8	0,5	0,8	0,3	0,6	0,4	0,6	0,3	1,1
Jasa pendidikan	5,4	5,4	5,7	4,7	7,0	5,6	3,9	1,8	4,0
Jasa kesehatan	1,3	1,2	1,2	0,9	1,3	1,2	1,4	0,7	1,1
Jasa kemasyarakatan, Pemerintahan, dan Perorangan	9,7	10,7	15,5	7,9	11,9	11,2	15,3	7,4	10,6
Lainnya	0,9	0,6	0,9	0,4	1,1	0,8	1,5	1,2	1,6
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel L.7
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan di Indonesia,
Hasil SP2010

Provinsi	Berusaha sendiri	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	Buruh/karyawan/pegawai	Pekerja bebas	Pekerja keluarga/tidak dibayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	25,5	16,8	5,4	26,4	6,0	20,0	100,0
Sumatera Utara	24,3	13,4	4,0	32,3	9,4	16,7	100,0
Sumatera Barat	30,7	13,1	4,5	26,7	11,6	13,4	100,0
Riau	31,7	6,5	4,8	38,4	9,9	8,7	100,0
Jambi	27,7	13,8	3,7	31,4	6,8	16,5	100,0
Sumatera Selatan	23,4	18,3	3,2	24,5	6,5	24,1	100,0
Bengkulu	20,9	22,7	2,3	22,3	5,7	26,2	100,0
Lampung	18,8	22,5	3,1	20,1	10,0	25,4	100,0
Kep. Bangka Belitung	28,0	7,5	7,0	41,3	7,4	8,9	100,0
Kepulauan Riau	21,2	1,6	3,8	64,1	6,9	2,4	100,0
Dki Jakarta	19,9	1,1	3,7	67,7	5,8	1,8	100,0
Jawa Barat	24,5	8,1	3,6	40,7	17,2	5,8	100,0
Jawa Tengah	21,0	15,9	3,0	28,9	16,7	14,5	100,0
D I Yogyakarta	20,1	15,0	3,2	36,4	9,5	15,8	100,0
Jawa Timur	21,5	15,1	3,4	28,9	15,3	15,8	100,0
Banten	23,4	6,1	3,3	51,0	10,2	5,9	100,0
Bali	21,6	13,2	2,9	38,9	8,7	14,7	100,0
Nusa Tenggara Barat	19,5	20,6	2,7	18,9	20,2	18,1	100,0
Nusa Tenggara Timur	17,7	26,1	1,8	14,3	3,1	37,0	100,0
Kalimantan Barat	24,5	16,4	2,8	25,0	5,5	25,8	100,0
Kalimantan Tengah	23,5	13,7	3,0	35,2	5,8	18,8	100,0
Kalimantan Selatan	27,6	14,4	3,1	32,3	5,7	16,9	100,0
Kalimantan Timur	26,3	4,9	3,4	50,6	7,0	7,7	100,0
Sulawesi Utara	33,8	6,6	4,5	32,9	14,3	7,9	100,0
Sulawesi Tengah	24,5	19,2	3,2	22,2	7,7	23,2	100,0
Sulawesi Selatan	23,3	19,5	3,9	25,9	7,1	20,2	100,0
Sulawesi Tenggara	22,6	20,6	3,5	23,6	4,6	25,1	100,0
Gorontalo	30,8	13,2	4,8	27,7	11,5	12,1	100,0
Sulawesi Barat	23,8	23,6	2,4	18,7	4,0	27,6	100,0
Maluku	31,7	14,8	2,7	27,0	3,3	20,5	100,0
Maluku Utara	31,7	15,1	3,8	23,3	5,5	20,7	100,0
Papua Barat	24,4	14,3	2,9	32,7	4,6	21,2	100,0
Papua	21,7	19,4	1,2	14,7	2,2	40,7	100,0
Nasional	23,0	13,5	3,4	33,1	12,1	14,7	100,0

Tabel L.8
Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Indonesia,
Hasil SP2010

Status Pekerjaan	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha sendiri	16 290 485	24,4	7 874 836	20,7	24 165 321	23,0
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	11 450 370	17,2	2 754 024	7,2	14 204 394	13,5
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	2 881 541	4,3	690 678	1,8	3 572 219	3,4
Buruh/karyawan/pegawai	22 908 928	34,3	11 838 066	31,1	34 746 994	33,1
Pekerja bebas	9 430 145	14,1	3 284 978	8,6	12 715 123	12,1
Pekerja keluarga/tidak dibayar	3 776 332	5,7	11 668 576	30,6	15 444 908	14,7
Total	66 737 801	100,0	38 111 158	100,0	104 848 959	100,0

Tabel L.9
Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal di Indonesia,
Hasil SP2010

Status Pekerjaan	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha sendiri	11 792 601	24,1	12 372 720	22,1	24 165 321	23,0
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	2 359 251	4,8	11 845 143	21,2	14 204 394	13,5
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	1 995 388	4,1	1 576 831	2,8	3 572 219	3,4
Buruh/karyawan/pegawai	24 986 623	51,1	9 760 371	17,4	34 746 994	33,1
Pekerja bebas	5 470 324	11,2	7 244 799	12,9	12 715 123	12,1
Pekerja keluarga/tidak dibayar	2 259 987	4,6	13 184 921	23,6	15 444 908	14,7
Total	48 864 174	100,0	55 984 785	100,0	104 848 959	100,0

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id

ISBN: 978-979-064-306-2



9 789790 643062